

**IMPLEMENTASI
RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN
DI KABUPATEN KENDAL**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-2

Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Program Studi : Magister Ilmu Administrasi

Konsentrasi : Magister Administrasi Publik



Diajukan oleh :
DIAH ANING BUDIARTI
D4E002028

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
2003**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Semarang, 22 September 2003



Diah Aning Budiarti

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI
RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN
DI KABUPATEN KENDAL**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Diah Aning Budiarti

D4E002028

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal : 22 September 2003

Susunan Tim Penguji

Ketua Penguji/Pembimbing I,



Drs. Ali Mufiz, MPA

Sekretaris Penguji/ Pembimbing II,



Dra. Retno Sunu Astuti, MSi

Anggota Dewan Penguji Lain :



1. Drs. Slamet Santoso, MSi



2. Drs. Sundarso, SU

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan

Untuk memperoleh gelar Magister Sain

Tanggal : 22 September 2003

Ketua Program Studi MAP

Universitas Diponegoro Semarang




Prof. Drs. Y. Warella, MPA, PhD.

4. Segenap rekan-rekan mahasiswa, khususnya angkatan VI pada Progam Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro.
5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini.

Penulis dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada, sangat menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi sempurnanya tesis ini.

Akhir kata, harapan penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat .

Semarang, September 2003

Penulis,

Diah Aning Budiarti

RINGKASAN

Seiring dengan bergulirnya era Otonomi Daerah yang diawali dengan terbitnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah bertujuan agar penyelenggaraan otonomi daerah lebih ditekankan pada demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan keaneka ragaman daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kendal berupaya mencari peluang-peluang dan potensi yang ada untuk meningkatkan penerimaan Daerah, sekaligus guna meningkatkan pelayanan, kepentingan dan kemanfaatan umum serta menganut prinsip komersial, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Jasa Usaha di Bidang Peternakan yang antara lain mencakup tentang retribusi pemeriksaan kesehatan hewan di pasar hewan. Peraturan Daerah ini ditetapkan karena Kabupaten Kendal mempunyai potensi yang cukup besar di bidang peternakan untuk dapat meningkatkan pendapatan asli Daerah.

Pemeriksaan Kesehatan Hewan terhadap ternak di Pasar Hewan bertujuan untuk menyediakan hewan potong yang berkualitas sekaligus sehat dan melindungi kesehatan masyarakat veteriner. Rendahnya realisasi pendapatan retribusi pemeriksaan kesehatan hewan di Kabupaten Kendal dibandingkan dengan potensi yang ada pada tahun 2002, karena rendahnya implementasi yang berdasarkan pengamatan penulis disebabkan oleh beberapa hal antara lain : 1). kurang jelasnya isi dari Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 22 Tahun 2001; 2). kurangnya kemampuan pelaksana dalam membaca potensi yang ada dan melaksanakan penarikan retribusi ;serta 3). Kurangnya komunikasi antar pelaksana dengan wajib retribusi.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 1).Koefisien korelasi antara Isi dengan Implementasi sebesar 0,056 dengan tingkat signifikansi 0,679, dapat diinterpretasikan bahwa tidak ada hubungan antara Isi dengan Implementasi 2).Koefisien korelasi antara Kemampuan Pelaksana dengan Implementasi sebesar 0.053 dengan tingkat signifikan 0,260, dapat diinterpretasikan bahwa tidak ada hubungan antara Kemampuan Pelaksana dengan Implementasi 3).Koefisien korelasi antara Komunikasi dengan Implementas sebesar 0,086 dengan tingkat signifikansi 0,311, dapat diinterpretasikan bahwa tidak ada hubungan antara Komunikasi dengan Implementasi .

Koefisien Konkordansi antara isi, kemampuan pelaksana dan komunikasi dengan implementasi sebesar 0,869 dengan tingkat signifikansi 0,00, dapat diinterpretasikan bahwa ketiga variabel tersebut secara bersama-sama mempunyai hubungan yang sangat signifikan dengan implementasi retribusi pemeriksaan kesehatan hewan di kabupaten Kendal.

Koefisien Determinasi sebesar 75,52 % yang menunjukkan tingkat sumbangan variabel isi, kemampuan pelaksana dan komunikasi terhadap implementasi. Hal ini berarti bahwa ada faktor-faktor lain di luar ketiga variabel tersebut yang

memberikan sumbangan sebesar 24,48 % terhadap implementasi retribusi pemeriksaan kesehatan hewan di kabupaten Kendal. Faktor-faktor lain diluar ketiga faktor tersebut diatas antara lain keragaman perilaku kelompok sasaran, dukungan dari pejabat atasan dan dukungan politik yang nyata, dukungan publik dan sumber-sumber serta kondisi sosio ekonomi dan teknologi.

Meskipun berdasarkan analisis tidak ada hubungan antara variabel-variabel isi, kemampuan pelaksana dan komunikasi secara sendiri-sendiri dengan implementasi, namun karena ketiga variabel tersebut secara simultan mempunyai hubungan yang sangat signifikan dengan implementasi dan tingkat sumbangannya yang cukup besar (75,52 %), maka saran yang bisa diberikan adalah :

1. Agar Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 22 Tahun 2001 dapat dilaksanakan secara optimal perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknisnya secara lengkap.
2. Peningkatan kemampuan pelaksana khususnya di dalam penanganan pemungutan retribusi pemeriksaan kesehatan hewan.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas komunikasi berupa sosialisasi baik berupa penyuluhan maupun secara tertulis.
4. Agar implementasi dapat berjalan secara optimal, maka variabel-variabel isi, kemampuan pelaksana dan komunikasi harus dilakukan secara simultan.
5. Selain tersebut diatas perlu pula dilaksanakan hal-hal sebagai berikut : a. Penyediaan prasarana yang memadai, b. Peningkatan koordinasi antara Petugas Dinas Pasar dan Petugas Peternakan dalam penarikan c. Dilakukan operasi yustisi penegakan Perda bekerja sama dengan Kantor Satpol PP Kabupaten dan Kepolisian d. Perlu adanya peningkatan kesejahteraan bagi petugas Dinas Peternakan di pasar hewan dengan memberikan imbalan berupa biaya operasional yang memadai, e. Adanya komitmen dan dukungan politik secara konkrit baik dari elit Eksekutif maupun Legislatif Pemerintah Kabupaten Kendal.
6. Untuk memperbaiki kinerja hasil penelitian ini dapat disarankan penyempurnaan dalam hal :
 - a. Penyusunan instrumen pertanyaan yang lebih operasional sehingga mudah dimengerti oleh responden;
 - b. Penentuan responden dilakukan dengan cara *purposive sampling*;
 - c. Teknik pengumpulan data selain melalui daftar pertanyaan secara kuantitatif juga perlu dilengkapi dengan kualitatif sehingga akan didapatkan gambaran sebenarnya mengenai keadaan responden .

ABSTRAKSI

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab, Pemerintah Kabupaten Kendal berupaya mencari peluang-peluang dan potensi yang ada untuk meningkatkan penerimaan Daerah, sekaligus guna meningkatkan pelayanan, kepentingan dan kemanfaatan umum serta menganut prinsip komersial, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Jasa Usaha di Bidang Peternakan yang antara lain mencakup tentang retribusi pemeriksaan kesehatan hewan di pasar hewan. Pemeriksaan Kesehatan Hewan terhadap ternak di Pasar Hewan bertujuan untuk menyediakan hewan potong yang berkualitas sekaligus sehat dan melindungi kesehatan masyarakat veteriner.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan di Kabupaten Kendal, yaitu Isi, Kemampuan Pelaksana dan Komunikasi.

Rancangan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dan kualitatif. Data-data kuantitatif yang diperoleh didiskripsikan secara sistematis dengan Tabel Tunggal, dan Tabel Silang, kemudian digunakan rumus Koefisien Korelasi Kendall, Koefisien Konkordansi Kendall dan Koefisien Determinasi. Analisa kualitatif digunakan untuk lebih memperjelas hasil analisa kuantitatif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 1).Koefisien korelasi antara Isi dengan Implementasi dapat diinterpretasikan bahwa tidak ada hubungan antara Isi dengan Implementasi 2).Koefisien korelasi antara Kemampuan Pelaksana dengan Implementasi dapat diinterpretasikan bahwa tidak ada hubungan antara Kemampuan Pelaksana dengan Implementasi 3).Koefisien korelasi antara Komunikasi dengan Implementasi dapat diinterpretasikan bahwa tidak ada hubungan antara Komunikasi dengan Implementasi .

Koefisien Konkordansi antara isi, kemampuan pelaksana dan komunikasi dengan implementasi dapat diinterpretasikan bahwa ketiga variabel tersebut secara bersama-sama mempunyai hubungan yang sangat signifikan dengan implementasi.

Koefisien Determinasi menunjukkan bahwa ada faktor-faktor lain di luar variabel isi, kemampuan pelaksana dan komunikasi yang memberikan sumbangan terhadap implementasi retribusi pemeriksaan kesehatan hewan di kabupaten Kendal.

ABSTRACT

Related to the implementation of local autonomy policy, Kendal regencial Government seeks available potencies and opportunities to increase its revenue, while at the same time increase its service and interest, as well as benefit received by the public. Accompanied by commercial principle, the regencial government stipulated Regencial Regulation Number 22, 2001, on Retribution on Commercial Service in Animal Husbandry Sector, covering among others retribution on animal health inspection at animal market. This inspection is aimed at providing qualified and healthy animal, as well as providing the society with safe and healthy meat.

This research was aimed at analyzing factors influencing the Implementation of retribution on Animal Health Inspection in Kendal regency, covering Policy Content, Capability of Executing Personnel, and Communication. Research methods were both quantitative and qualitative. Quantitative data was described systematically with single table and cross table, then tested with Kendall Coefficient Correlation, Kendall Concordance Coefficient, and Determination Coefficient. Qualitative analysis was then applied to enhance the description quality of the quantified data. Research findings using correlation coefficient show that : 1) There is no relation between policy content and implementation; 2) There is no relation between capability of executing personnel with implementation; and 3) There is no relation between communication and implementation.

Meanwhile, the use of Concordance Coefficient formula to test the relation of the three variables altogether with implementation shows a very significant relation. Besides, the use of Determination Coefficient shows that there is other factors outside these three variables support the implementation of this retribution in Kendal regency.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
RINGKASAN	vii
ABSTRAKSI	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian	13
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Landasan Teori	14
1. Kebijakan Publik	14

2. Implementasi Kebijakan	17
3. Isi	28
4. Kemampuan Pelaksana	31
5. Komunikasi	36
B. Penelitian Yang Relevan	40
C. Hipotesis	42
BAB III : METODE PENELITIAN	43
A. Rancangan Penelitian	43
B. Ruang Lingkup	44
C. Lokasi Penelitian	45
D. Variabel Penelitian	45
1. Definisi Konseptual	45
2. Definisi Operasional	46
E. Jenis dan Sumber Data	49
F. Instrumen Penelitian	50
G. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel	52
H. Teknik Pengumpulan Data	54
I. Teknik Analisa Data	55
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	58
A. Deskripsi Wilayah Penelitian	58
B. Hasil penelitian	67

C. Analisis Hasil Penelitian	88
D. Diskusi	99
BAB V : SIMPULAN DAN SARAN	106
A. Simpulan	106
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II-1. Model Implementasi Kebijakan Menurut Mazmanian Dan Sabatier	19
II-2. Model Proses Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn	21
II-3. Model Implementasi Kebijakan Menurut Grindle	23
II-4. Gambaran Skematis Mengenai Persyaratan Kelayakan	24
II-5. Susunan Kerangka Pikir Implementasi Kebijakan Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Di Kabupaten Kendal	26
II-6. Gambaran Skematis Persyaratan Kelayakan Implementasi Kebijak- an Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan di Kabupaten Kendal	27
II-7. Hubungan Antar Variabel	42
IV-1. Bagan Susunan Organisasi Dinas Peternakan Kabupaten Kendal	63

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I - 1 Populasi Ternak di Kabupaten Kendal	4
I - 2 Pendapatan Dinas Peternakan Kabupaten Kendal Tahun – 2000 – 2001	5
I - 3 Target dan Realisasi Pendapatan Dinas Peternakan Kabupaten Kendal Tahun 2002	5
I - 4 Target dan Realisasi Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan di Pasar Hewan di Kabupaten Kendal Tahun 2002	8
I - 5 Perdagangan Ternak di Pasar Hewan Kabupaten Kendal	9
I - 6 Estimasi Pendapatan Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan di Pasar Hewan di Kabupaten Kendal Tahun 2002	9
III - 7 Perkiraan Jumlah Populasi dan Sampel	53
III - 8 Daftar Informan	53
IV - 1 Kapasitas Tampung dan Jumlah Petugas Pasar Hewan	65
IV - 2 Tingkat Manfaat Retribusi Secara Finansial Bagi Pemerintah Daerah	68
IV - 3 Tingkat Manfaat Retribusi Secara Sosial Bagi Pemerintah Daerah	69
IV - 4 Tingkat Pemahaman Tujuan Retribusi	70
IV - 5 Pentingnya Penarikan Retribusi	70

IV - 6 Tingkat Dukungan Terhadap Retribusi	71
IV - 7 Persentase Ternak Yang Diperiksa Kesehatannya	72
IV - 8 Kemampuan Petugas Dalam Pemeriksaan Hewan	73
IV - 9 Pengetahuan Petugas Dalam Menangani Permasalahan Kebijakan	74
IV - 10 Kualitas Pemeriksaan	75
IV - 11 Tingkat Hubungan Kerja Sama Dengan Petugas	76
IV - 12 Kualitas Pelayanan Petugas	76
IV - 13 Pelaksanaan Prosedur Penarikan Retribusi	77
IV - 14 Tingkat Ketertiban Pemungutan Retribusi	78
IV - 15 Frekuensi Mengikuti Sosialisasi Kebijakan	79
IV - 16 Tingkat Penyampaian Informasi	80
IV - 17 Persentase Wajib Retribusi Yang Menerima Sosialisasi	81
IV - 18 Konsistensi Informasi yang Disampaikan	82
IV - 19 Konsistensi Informasi Antar Petugas Pelaksana	82
IV - 20 Kejelasan Informasi Yang Disampaikan	83
IV - 21 Kelengkapan Informasi Yang Disampaikan	83
IV - 22 Tingkat Pemahaman Isi Kebijakan	84
IV - 23 Frekuensi Penyampaian Usul, Saran dan Masukan	85
IV - 24 Tanggapan Atas Usul, Saran dan Masukan yang Disampaikan	86
IV - 25 Kualitas Tanggapan Yang Diterima	86
IV - 26 Persentase Ternak Yang Dibayar Retribusinya	87
IV - 27 Tabel silang 4*4 Hubungan Isi Dengan Implementasi	89

IV – 28Tabel Silang 2*2 Hubungan Isi Dengan Implementasi	90
IV – 29Uji Signifikansi Hubungan Isi Dengan Implementasi	91
IV – 30Tabel silang 4*4 Hubungan Kemampuan Pelaksana Dengan Implementasi	91
IV – 31Tabel Silang 2*2 Hubungan Kemampuan Pelaksana Dengan Implementasi	92
IV – 32Uji Signifikansi Hubungan Kemampuan Pelaksana Dengan Implementasi	93
IV – 33Tabel silang 4*4 Hubungan Komunikasi Dengan Implementasi	94
IV – 34Tabel Silang 2*2 Hubungan Komunikasi Dengan Implementasi	95
IV – 35Uji Signifikansi Hubungan Komunikasi Dengan Implementasi	95
IV – 36Koefisien Korelasi Antara Isi, Kemampuan Pelaksana dan Komunikasi dengan Implementasi	97
IV – 37Koefisien Konkordansi Antara Isi, Kemampuan Pelaksana dan Komunikasi dengan Implementasi	98

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :

1. Tabel Induk
2. Total Variabel dan Skor Variabel
3. Tabel Silang dan Hasil Perhitungan Statistik
4. Daftar Kuesioner dan Interview Guide

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah bertujuan agar penyelenggaraan otonomi daerah lebih ditekankan pada demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan keaneka ragaman daerah. Undang-undang ini juga menetapkan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Untuk ini diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, selain dukungan dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Kendal telah berupaya mencari peluang-peluang dan potensi yang ada untuk meningkatkan penerimaan Daerah yang di dalam Pasal 79 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 disebutkan bahwa :

Sumber pendapatan Daerah terdiri atas :

- a. pendapatan asli Daerah, yaitu : 1) hasil pajak Daerah, 2) hasil retribusi Daerah, 3) hasil perusahaan milik Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan 4) lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- b. dana perimbangan;
- c. pinjaman Daerah;
- d. lain-lain pendapatan Daerah yang sah

Dari keempat macam sumber pendapatan asli Daerah tersebut diatas, retribusi Daerah diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Meskipun beberapa jenis pajak Daerah dan retribusi Daerah sudah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, namun Daerah masih diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak dan retribusi selain yang ditetapkan sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai aspirasi masyarakat; sehingga dengan demikian Daerah akan mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri

Retribusi Daerah menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Disebutkan pula dalam Pasal 18 bahwa objek retribusi Daerah terdiri dari : a. Jasa Umum, b. Jasa Usaha dan c. Perizinan Tertentu. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah telah ditetapkan jenis-jenis retribusi tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Retribusi Jasa Umum, meliputi :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan;
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;

- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - f. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - i. Retribusi Penggantian Cetak Peta;
 - j. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.
2. Retribusi Jasa Usaha, meliputi :
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Tempat Pelelangan;
 - d. Retribusi Terminal;
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - g. Retribusi Penyedotan Kakus;
 - h. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;
 - j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
 - k. Retribusi Penyeberangan Diatas Air;
 - l. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 - m. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
3. Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi :
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - c. Retribusi Izin Gangguan;
 - d. Retribusi Izin Trayek.

Di dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 juga disebutkan bahwa dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis retribusi lainnya sesuai kriteria yang ditetapkan dalam Undang-undang.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna meningkatkan pelayanan, kepentingan dan kemanfaatan umum serta menganut prinsip komersial, Pemerintah Kabupaten Kendal pada tanggal 30 Nopember 2001 telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Jasa Usaha di Bidang Peternakan. Peraturan Daerah ini

ditetapkan karena Kabupaten Kendal mempunyai potensi yang cukup besar di bidang peternakan untuk dapat meningkatkan pendapatan asli Daerah, hal ini dapat dilihat dari jumlah populasi ternak yang ada di kabupaten Kendal (Tabel : I -1)

Tabel : I -1
POPULASI TERNAK
DI KABUPATEN KENDAL

No	Jenis Ternak	Tahun (Ekor)		
		2000	2001	2002
1.	Sapi potong	15.144	15.270	15.311
2.	Sapi perah	34	39	39
3.	Kerbau	5.095	4.862	4.851
4.	Kuda	658	896	877
5.	Kambing	58.561	56.713	56.720
6.	Domba	51.662	50.271	50.367
7.	Babi	1.576	1.332	201
8.	Ayam ras petelur	1.467.400	1.565.600	1.591.711
9.	Ayam ras pedaging	4.075.500	4.307.175	4.739.213
10.	Ayam buras	847.905	848.349	848.631
11.	Itik	118.047	125.198	125.375
12.	Burung puyuh	24.450	24.600	30.730

Sumber : *Dinas Peternakan Kabupaten Kendal, 2003.*

Realisasi pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2001 ini meskipun baru dimulai pada tahun 2002 (Tabel : I - 3) namun ternyata hasilnya telah dapat meningkatkan pendapatan dari Dinas Peternakan dibandingkan tahun 2000 dan 2001 (Tabel : I - 2).

Tabel : I - 2
PENDAPATAN DINAS PETERNAKAN KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2000-2001

No	Jenis Pendapatan	Tahun (Rp)	
		2000	2001
1.	Retribusi RPH *)	23.529.000,00	32.403.000,00
2.	Retribusi lainnya *)	3.397.000,00	61.905.000,00
3.	Sumbangan Pihak Ketiga**)	-	2.850.000,00
	J U M L A H	26.926.000,00	97.158.000,00

Sumber : *Dinas Peternakan Kabupaten Kendal, 2002.*

Keterangan :

*) Dasar : Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

**) Dasar : Keputusan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2001 tentang Penetapan Besarnya Sumbangan Pihak Ketiga dari Pengusaha Peternakan Kepada Daerah Kabupaten Kendal.

Tabel : I - 3
TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN
DINAS PETERNAKAN KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2002

No	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Retribusi RPH	50.000.000,00	50.225.000,00
2.	Ret. Pemeriksaan Keswan di Pasar Hewan	15.000.000,00	15.637.500,00
3.	Ret. Pemeriksaan Daging	6.720.000,00	12.116.200,00
4.	Ret. Keswan Wilayah	-	2.334.500,00
5.	Ret. Pemakaian alat	23.000.000,00	26.000.000,00
6.	Ret. Ijin usaha	7.500.000,00	3.550.000,00
7.	Bagi hasil kereman	200.000.000,00	145.462.500,00
8.	Pengembalian modal	5.500.000,00	5.500.000,00
9.	Sumbangan Pihak ketiga	50.000.000,00	28.019.100,00
10.	Kaji terap	-	18.000.000,00
	J U M L A H	357.720.000,00	306.844.800,00

Sumber : *Dinas Peternakan Kabupaten Kendal, 2003.*

Namun apabila dicermati lebih lanjut dari Tabel : I - 2 dan Tabel : I - 3, dapat dilihat bahwa sebenarnya naiknya pendapatan Dinas Peternakan Kabupaten Kendal pada tahun 2002 lebih disebabkan karena adanya sumber-sumber pendapatan baru seperti misalnya : bagi hasil kereman, pengembalian modal dan kaji terap, disamping itu juga kenaikan dari retribusi RPH dan sumbangan dari pihak ketiga, sedangkan retribusi-retribusi yang lain bila digabungkan menjadi satu jumlahnya hanya Rp.59.638.200,- yang berarti lebih kecil bila dibandingkan dengan jumlah retribusi lainnya pada tahun 2001.

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 22 Tahun 2001 disebutkan bahwa objek retribusi jasa usaha di bidang peternakan sebagaimana tercantum pada Pasal 3 adalah :

Pelayanan Jasa di Bidang peternakan yang meliputi : a. Pemeriksaan daging/hewan yang dipotong di RPH/RPU, TPH/TPU; b. Pemeriksaan kulit; c. Pemeriksaan kebuntingan dan kemajiran; d. Penggunaan fasilitas RPH/RPU, TPH/TPU, Mobil Unit klinik Kesehatan Hewan Keliling/Pos Kesehatan Hewan; e. Penggunaan timbangan ternak; f. Penggunaan laboratorium Kesehatan Hewan; g. Penggunaan Peralatan Inseminasi Buatan.

Dari objek retribusi Huruf d Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 22 Tahun 2001 diatas, terdapat penggunaan fasilitas mobil unit klinik kesehatan hewan keliling/pos kesehatan hewan yang di dalam Pasal 8 Huruf d Angka 2 disebutkan digunakan untuk Pemeriksaan Kesehatan Hewan terhadap ternak di Pasar Hewan dan masyarakat.

Pemeriksaan Kesehatan Hewan terhadap ternak di Pasar Hewan bertujuan untuk menyediakan hewan potong yang berkualitas sekaligus sehat dan melindungi kesehatan masyarakat veteriner (Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan). Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia (penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner).

Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan di Pasar Hewan di Kabupaten Kendal mulai dilaksanakan secara efektif mulai bulan Januari tahun 2002, yang sebelumnya di dahului dengan adanya sosialisasi Perda selama satu bulan, yaitu bulan Desember 2001.

Di Kabupaten Kendal terdapat 4 Pasar Hewan, yaitu di Kecamatan Cepiring, Sukorejo, Boja dan Weleri. Adapun jenis ternak yang diperiksa kesehatannya di pasar hewan meliputi a. ternak besar (sapi, kerbau, kuda) b. ternak kecil (kambing, domba) dengan tarif retribusi sebesar Rp.1.500,- per ekor ternak besar dan Rp.500,- per ekor ternak kecil.

Pada tahun 2002, target penerimaan dari retribusi pemeriksaan kesehatan hewan di pasar hewan telah terlampaui sebagaimana pada Tabel : I – 4.

Tabel : I - 4
TARGET DAN REALISASI RETRIBUSI
PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN
DI PASAR HEWAN DI KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2002

No	Lokasi Pasar Hewan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
1.	Cepiring	3.300.000,00	4.041.000,00	122,45
2.	Sukorejo	9.000.000,00	8.980.500,00	99,78
3.	Boja	1.800.000,00	1.715.500,00	95,31
4.	Weleri	900.000,00	900.500,00	100,06
	Jumlah	15.000.000,00	15.637.500,00	104,25

Sumber : *Dinas Peternakan Kabupaten Kendal, 2003.*

Bila dilihat dari Tabel : I - 4, maka dapat dikatakan bahwa untuk pencapaian target pendapatan tahun 2002 sudah dapat terlampaui. Namun berdasarkan pengamatan penulis ternyata terlampauinya target yang ditetapkan antara lain disebabkan karena penetapan targetnya yang terlalu rendah dibandingkan potensi yang ada. Hal ini dapat dicermati dari banyaknya ternak yang diperdagangkan di pasar hewan yang seharusnya semua dikenai retribusi pemeriksaan kesehatan hewan. Bila seluruh ternak yang diperdagangkan di pasar hewan ditarik retribusi, maka pendapatan Dinas Peternakan akan jauh lebih tinggi dibandingkan pencapaian tahun 2002 sebagaimana estimasi yang tercantum pada Tabel : I - 6.

Tabel : I - 5
PERDAGANGAN TERNAK DI PASAR HEWAN
KABUPATEN KENDAL

No	Jenis Ternak	Tahun (Ekor)		
		2000	2001	2002
1.	Sapi	15.217	14.143	13.827
2.	Kerbau	4.305	2.966	1.348
3.	Kambing	28.958	45.588	31.844
4.	Domba	21.658	22.200	17.628

Sumber : *Dinas Peternakan Kabupaten Kendal, 2003.*

Bila pelaksanaan penarikan retribusi pemeriksaan kesehatan hewan dikenakan pada seluruh ternak yang diperdagangkan di pasar hewan, maka pendapatan yang diperoleh akan jauh lebih tinggi dari realisasi pendapatan tahun 2002, sebagaimana estimasi pada Tabel : I - 6

Tabel : I - 6
ESTIMASI PENDAPATAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN
KESIHATAN HEWAN DI PASAR HEWAN DI KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2002

No	Jenis Ternak	Jumlah (ekor)	Tarif Retribusi (Rp)	Jumlah Pendapatan (Rp)
1.	Sapi	13.827	1.500,00	20.740.500,00
2.	Kerbau	1.348	1.500,00	2.022.000,00
3.	Kambing	31.844	500,00	15.922.000,00
4.	Domba	17.628	500,00	8.814.000,00
	Jumlah			47.498.500,00

Sumber : *Diolah dari data Dinas Peternakan Kabupaten Kendal*

Rendahnya realisasi pendapatan retribusi pemeriksaan kesehatan hewan di pasar hewan di Kabupaten Kendal dibandingkan dengan potensi yang ada pada tahun 2002, menunjukkan rendahnya implementasi retribusi pemeriksaan kesehatan hewan di pasar hewan yang berdasarkan pengamatan penulis disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

1. Kurang jelasnya isi dari Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Jasa Usaha di Bidang Peternakan, khususnya yang berkaitan dengan retribusi pemeriksaan kesehatan hewan di pasar hewan.
2. Kurangnya kemampuan pelaksana dalam membaca potensi yang ada dan menuangkannya dalam target pendapatan .
3. Kurang dipahaminya Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Jasa Usaha di Bidang Peternakan, khususnya yang berkaitan dengan retribusi pemeriksaan kesehatan hewan oleh wajib retribusi karena kurangnya komunikasi.

Disamping itu, berdasarkan pengamatan penulis, tidak semua ternak yang diperdagangkan di pasar hewan diperiksa kesehatannya, hal ini menyebabkan meningkatnya resiko adanya ternak sakit yang dikonsumsi manusia dan tentu saja akan membahayakan kesehatan masyarakat veteriner. Disamping itu pemeriksaan yang dilakukan terhadap ternak di pasar hewan belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal

Nomor 22 Tahun 2001, dimana disebutkan bahwa pemeriksaan kesehatan hewan di pasar hewan dilakukan dengan menggunakan fasilitas Mobil Unit Klinik Kesehatan Hewan/Pos Kesehatan Hewan, namun kenyataannya sering kali hanya dilakukan pemeriksaan yang sangat sederhana yaitu melalui pengamatan sekilas.

Kemudian mengenai penyediaan fasilitas pasar hewan yang kapasitas tampungnya kurang memadai, hal ini dapat dilihat dimana pada saat-saat tertentu banyak hewan yang tidak tertampung di dalam pasar hewan, hal ini tentu saja akan mempengaruhi penarikan retribusi sekaligus menyulitkan petugas melakukan pemeriksaan kesehatan hewan.

Berdasarkan diskripsi permasalahan tersebut, maka penulis mencoba untuk melakukan kajian studi implementasi retribusi pemeriksaan kesehatan hewan di pasar hewan, dengan judul penelitian :

“ IMPLEMENTASI RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN DI KABUPATEN KENDAL “.

B. Perumusan Masalah

Memperhatikan uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka perlu dilakukan kajian yang mendalam terhadap masalah-masalah yang berpengaruh terhadap Implementasi Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan di Kabupaten Kendal. Dari berbagai masalah tersebut, penulis menyusun perumusan masalah yang paling berpengaruh terhadap

Implementasi Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan di Kabupaten Kendal sebagai berikut :

1. Apakah Isi mempunyai hubungan dengan Implementasi ?
2. Apakah Kemampuan Pelaksana mempunyai hubungan dengan Implementasi ?
3. Apakah Komunikasi mempunyai hubungan dengan Implementasi ?
4. Apakah Isi , Kemampuan Pelaksana dan Komunikasi secara bersama-sama mempunyai hubungan dengan Implementasi ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi retribusi pemeriksaan kesehatan hewan di pasar hewan di Kabupaten Kendal .
2. Untuk menganalisis hubungan antara Isi dengan Implementasi .
3. Untuk menganalisis hubungan antara Kemampuan Pelaksana dengan Implementasi .
4. Untuk menganalisis hubungan antara Komunikasi dengan Implementasi .
5. Untuk menganalisis hubungan antara Isi, Kemampuan Pelaksana dan Komunikasi secara bersama-sama dengan Implementasi .

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang implementasi retribusi pemeriksaan kesehatan hewan di Kabupaten Kendal .
2. Memberikan masukan bagi Dinas Peternakan Kabupaten Kendal dalam rangka memperbaiki implementasi retribusi pemeriksaan kesehatan hewan di Kabupaten Kendal, baik dalam peningkatan pendapatan Daerah maupun dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat veteriner.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Agar lebih memahami tentang Implementasi Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan di kabupaten Kendal, maka perlu dikaji lebih dahulu teori-teori yang berhubungan dengan implementasi kebijakan tersebut, antara lain sebagai berikut :

1. Kebijakan Publik

Ada berbagai macam definisi mengenai kebijaksanaan negara, hal ini diakui karena memang sulit untuk mendapatkan definisi yang benar-benar memuaskan; baik lantaran menurut sifatnya yang terlalu luas, kabur atau lantaran tidak spesifik dan operasional (Abdul Wahab, 1997 : 4). Thomas R. Dye dalam Islamy (2000 : 18) mendefinisikan kebijaksanaan negara sebagai “ Apapun yang dipilih Pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan” selanjutnya juga disebutkan bahwa bila Pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (obyektifnya) dan kebijaksanaan itu harus meliputi semua “tindakan” pemerintah jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

Jenkins dalam Abdul Wahab (2001 : 4) merumuskan kebijaksanaan negara sebagai :

Serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi di mana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.

Edwards dan Sharkansky dalam Islamy (2000 : 18) menyatakan bahwa "Kebijaksanaan negara itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan-peraturan perundang-undangan atau dalam bentuk pidato pejabat-pejabat teras pemerintah ataupun berupa programa-programa atau tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah".

Kebijakan publik selalu mengandung setidaknya-tidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut. (Wibawa, 1994 :15)

Pendapat ini dipekuat oleh Anderson dalam Islamy (2000:19) yang menyatakan bahwa :

Kebijaksanaan negara adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Implikasi dari pengertian kebijaksanaan negara tersebut adalah : 1) bahwa kebijaksanaan negara itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan, 2) bahwa kebijaksanaan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah; 3) bahwa kebijaksanaan itu adalah merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakukan suatu; 4) bahwa kebijaksanaan negara itu bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat

negatif – dalam arti : merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu; dan 5) bahwa kebijaksanaan pemerintah – setidaknya-tidaknya dalam arti yang positif – didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan-peraturan perundangan dan bersifat memaksa (otoritatif).

Oleh Winarno (2002 : 19) juga disebutkan bahwa :

Kebijakan publik mempunyai sifat “paksaan” yang secara potensial sah dilakukan. Sifat memaksa ini tidak dimiliki oleh organisasi-organisasi swasta, hal ini berarti bahwa kebijakan publik menuntut ketaatan yang luas dari masyarakat. Sifat ini yang membedakan kebijakan publik dengan kebijakan lainnya”.

Namun kebijakan yang memberikan manfaat aktual (bukan hanya formal, ritual dan simbolis) kepada banyak pelaku yang akan lebih mudah diimplementasikan dibanding dengan yang kurang bermanfaat (Wibawa, 1994 : 24).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebijakan retribusi pemeriksaan kesehatan hewan di pasar hewan merupakan kebijakan publik karena mengandung unsur 1) tujuan ; 2) dilakukan oleh pemerintah dan pejabat pemerintah; 3) dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah ,dan 4) dilandaskan pada peraturan perundangan dan bersifat memaksa.

Fenomena yang diamati dalam penelitian ini adalah 1). Tujuan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 22 tahun 2001; 2) Implementasi penarikan retribusi.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijaksanaan. Kebijaksanaan-kebijaksanaan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan (Udoji dalam Abdul Wahab, 2001 : 59) .Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Abdul Wahab (2001 : 65) merumuskan proses implementasi kebijaksanaan sebagai :

“ those action by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions”

(tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan)

Abdul Wahab, (2001 : 68) mengutip pendapat A.Mazmanian dan Paul Sabatier menyebutkan :

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijaksanaan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksanaan, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata—baik yang dikehendaki atau yang tidak—dari output tersebut, dampak keputusan sebagai dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil

keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap undang-undang/peraturan yang bersangkutan.

Mazmanian dan Sabatier dalam Islamy (2000 : 65) menjelaskan makna implementasi sebagai berikut :

Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

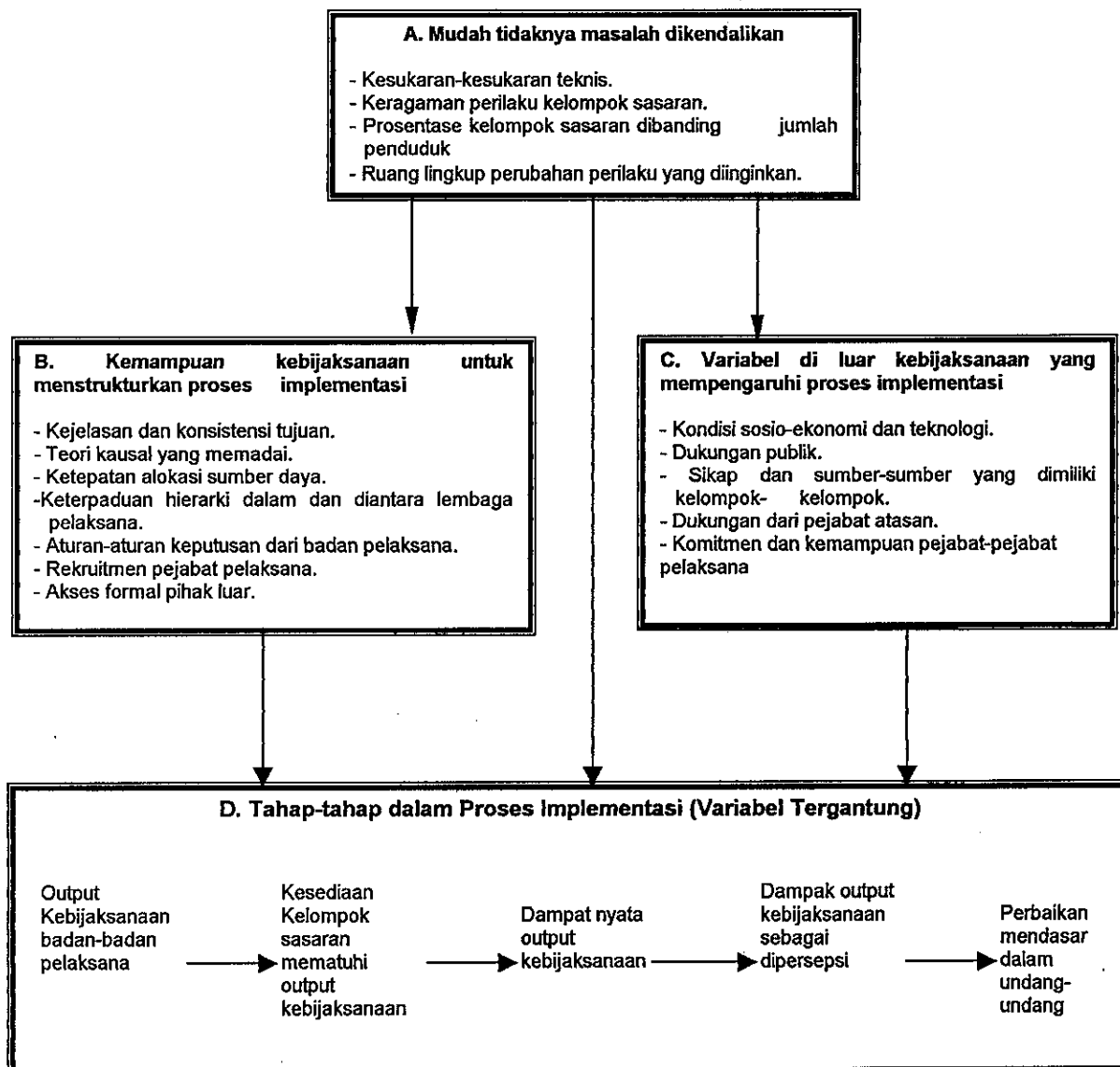
Mazmaniar dan Sabatier (Abdul Wahab, 2001 : 81) menyebutkan bahwa variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori besar, yaitu :

1. Mudah tidaknya masalah dikendalikan, dilihat dari :
 - Kesukaran-kesukaran teknis.
 - Keragaman perilaku kelompok sasaran.
 - Prosentase kelompok sasaran dibanding jumlah penduduk
 - Ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan.
2. Kemampuan kebijaksanaan untuk menstrukturkan proses implementasi, dilihat dari :
 - Kejelasan dan konsistensi tujuan.
 - Teori kausal yang memadai.
 - Ketepatan alokasi sumber daya.
 - Keterpaduan hierarki dalam dan diantara lembaga pelaksana.
 - Aturan-aturan keputusan dari badan pelaksana.
 - Rekrutmen pejabat pelaksana.
 - Akses formal pihak luar.
3. Variabel di luar kebijaksanaan yang mempengaruhi proses implementasi, dilihat dari :
 - Kondisi sosio-ekonomi dan teknologi.

- Dukungan publik.
- Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok-kelompok.
- Dukungan dari pejabat atasan.
- Komitmen dan kemampuan pejabat-pejabat pelaksana.

Gambar II – 1

MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MENURUT MAZMANIAN DAN SABATIER



Sumber : *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Abdul Wahab, 2001 : 82

Pendapat ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Wibawa (1994: 16) yang menyebutkan bahwa kegiatan implementasi baru dilakukan setelah kebijakan memperoleh pengesahan dari legislatif dan alokasi sumber dayanya juga disetujui

Adapun masalah-masalah yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada perwujudan secara riil kebijaksanaan tersebut tetapi juga mempunyai kaitan dengan konsekuensi atau dampak yang akan nampak pada pelaksanaan kebijaksanaan tersebut. Dengan demikian, pembuat kebijaksanaan tidak hanya ingin melihat kebijaksanaannya telah dilaksanakan oleh masyarakat, tetapi juga ingin mengetahui seberapa jauh kebijaksanaan tersebut telah memberikan konsekuensi positif dan negatif bagi masyarakat (Islamy, 2000 :102).

Sejumlah variabel yang akan membuka jalan suksesnya kebijaksanaan meraih prestasi, oleh Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Abdul Wahab (2001 : 78) meliputi :

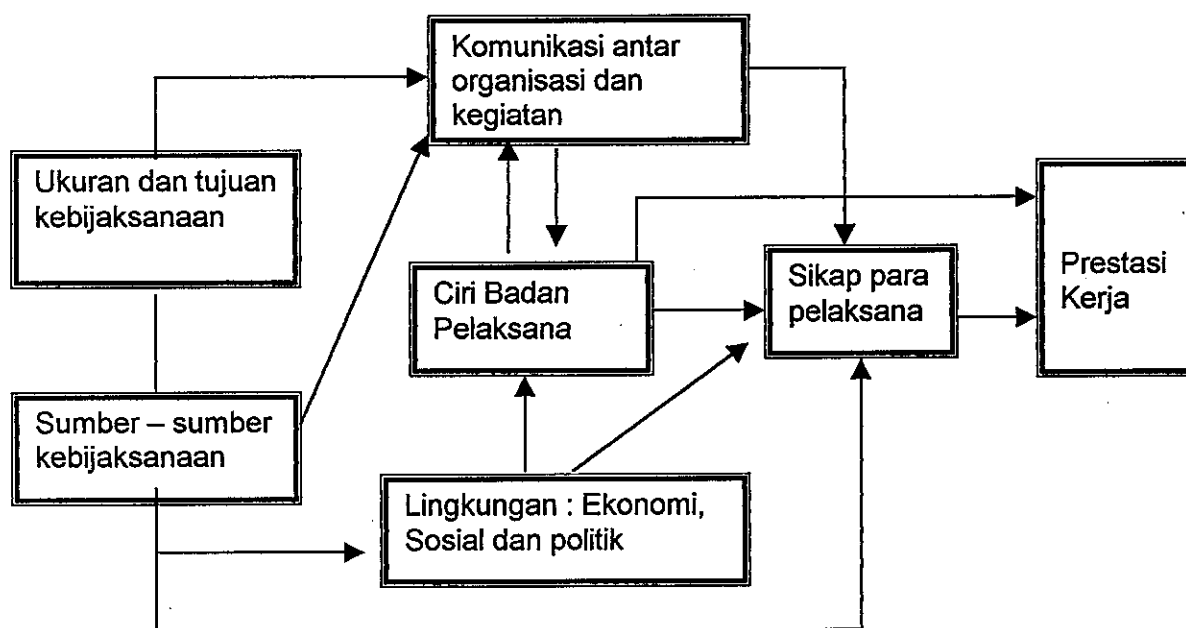
1. Ukuran dan tujuan kebijaksanaan;
2. Sumber-sumber kebijaksanaan;
3. Ciri-ciri atau sifat Badan/Instansi pelaksana;
4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan;
5. Sikap para pelaksana; dan
6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Disebutkan juga bahwa implementasi kebanyakan akan berhasil apabila perubahan yang dikehendaki relatif sedikit, sementara

kesepakatan terhadap tujuan-terutama dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan relatif tinggi. Disamping hal tersebut diatas, *perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak* merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur-prosedur implementasi.

Gambar II – 2

**MODEL PROSES IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
MENURUT VAN METER DAN VAN HORN**



Sumber : *Evaluasi Kebijakan Publik*, Samodra Wibawa, 1994 : 19

Dari pandangan tersebut diatas, bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan – badan administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan lainnya. Dari keterlibatan tersebut diharapkan akan berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan (intended) maupun yang tidak diharapkan (unintended). Jadi dengan melihat dari dampak, maka dapat dijadikan sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan implementasi kebijakan, dan juga dapat dijadikan sebagai masukan dalam proses perumusan / formulasi kebijakan yang akan meningkatkan kualitas kebijakan tersebut.

Sedangkan Grindle (1980) dalam Wibawa (1997 : 22) menyebutkan bahwa :

Implementasi kebijakan ditentukan oleh *isi* kebijakan dan *konteks* implementasinya.

Isi kebijakan mencakup :

- (1) kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan,
- (2) jenis manfaat yang dihasilkan,
- (3) derajat perubahan yang diinginkan,
- (4) kedudukan pembuat kebijakan,
- (5) siapa pelaksana program,
- (6) sumber daya yang dikerahkan.

Konteks kebijakan mempengaruhi proses implementasi sebagaimana pengaruh kondisi sosial, ekonomi dan politik seperti yang dijelaskan dalam model Meter dan Horn.

Yang dimaksudkan oleh Grindle dengan konteks kebijakan adalah :

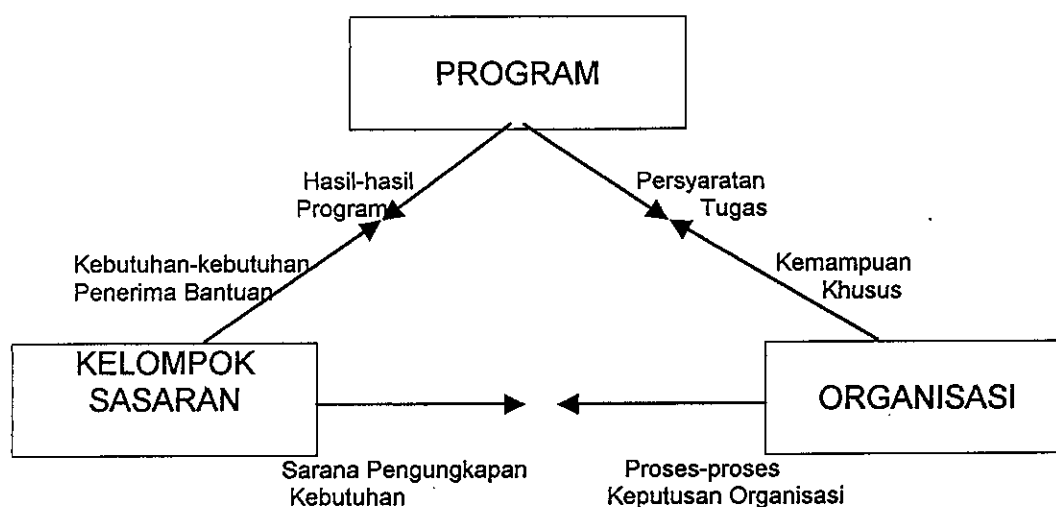
- (1) kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat,
- (2) karakteristik lembaga dan penguasa dan
- (3) kepatuhan serta daya tanggap pelaksana (Wibawa 1997 : 24)

D.C Korten (1988 : 240) menyebutkan bahwa :

Daya kerja dari suatu program pembangunan adalah fungsi kesesuaian antara mereka yang dibantu, program, dan organisasi yang membantu. Dengan istilah yang lebih khusus, program pembangunan akan gagal memajukan kesejahteraan suatu kelompok jika tidak ada hubungan yang erat antara : kebutuhan-kebutuhan pihak penerima bantuan dengan hasil program; persyaratan program dengan kemampuan nyata dari organisasi pembantu; dan kemampuan pengungkapan kebutuhan oleh pihak penerima dan proses pengambilan keputusan dari organisasi pembantu.

Gambar II – 4

GAMBARAN SKEMATIS MENGENAI PERSYARATAN KELAYAKAN



Sumber : *Pembangunan Kerakyatan*, David C Korten, 1988 :

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keberhasilan suatu program yang biasanya merupakan suatu kebijakan sangat tergantung dari :

1. Kualitas program itu sendiri,

2. Bagaimana organisasi pelaksana atau organisasi yang membantu melaksanakan/merealisasikan program, dan
3. Bagaimana kelompok penerima bantuan mengakses program tersebut.

Berkaitan dengan hal ini, dapat dikatakan bahwa salah satu tolok ukur kebijakan terletak pada proses implementasinya. Bahkan mungkin tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan (Jones, 1996: 293-294). Namun demikian bukan berarti implementasi kebijakan terpisah dengan formulasinya, melainkan keberhasilan suatu kebijakan sangat tergantung pada tatanan kebijakan itu sendiri (Macro policy dan Micro policy). Artinya formulasi kebijakan makro yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, keberhasilan implementasi akan dipengaruhi kebijakan mikro yaitu para pelaksana kebijakan, dan kebijakan operasional serta kelompok sasaran dalam mencermati lingkungan.

George Edwards III dalam Winarno (2002 : 126) menyebutkan ada 4 (empat) faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan yaitu :

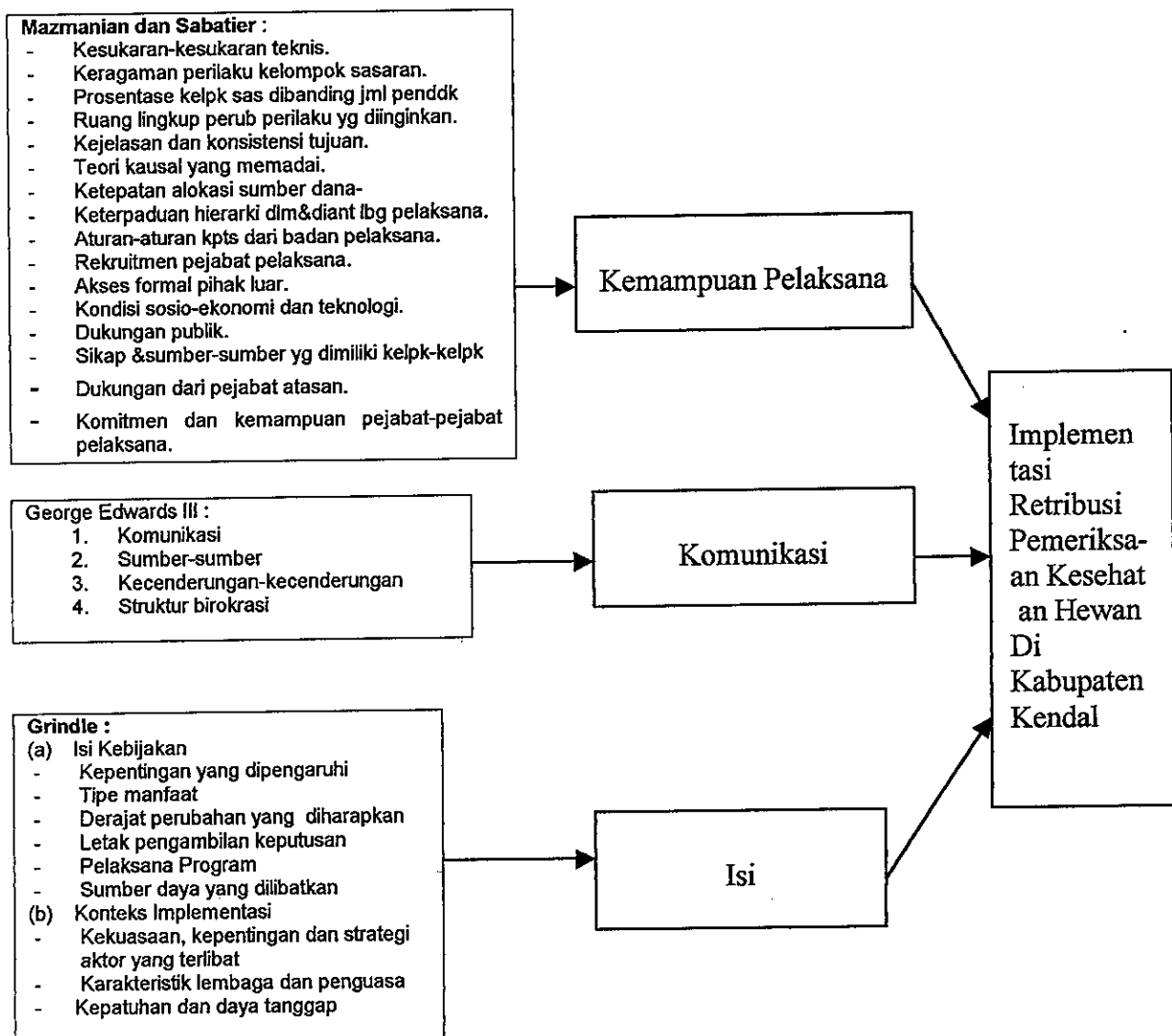
1. Komunikasi
2. Sumber-sumber
3. Kecenderungan-kecenderungan
4. Struktur birokrasi

UPT-PUSTAK-RESEP

Memperhatikan pendapat dari para pakar tersebut diatas, dapat disusun kerangka pikir implementasi retribusi pemeriksaan kesehatan hewan di kabupaten Kendal sebagaimana pada Gambar II-5.

Gambar II - 5

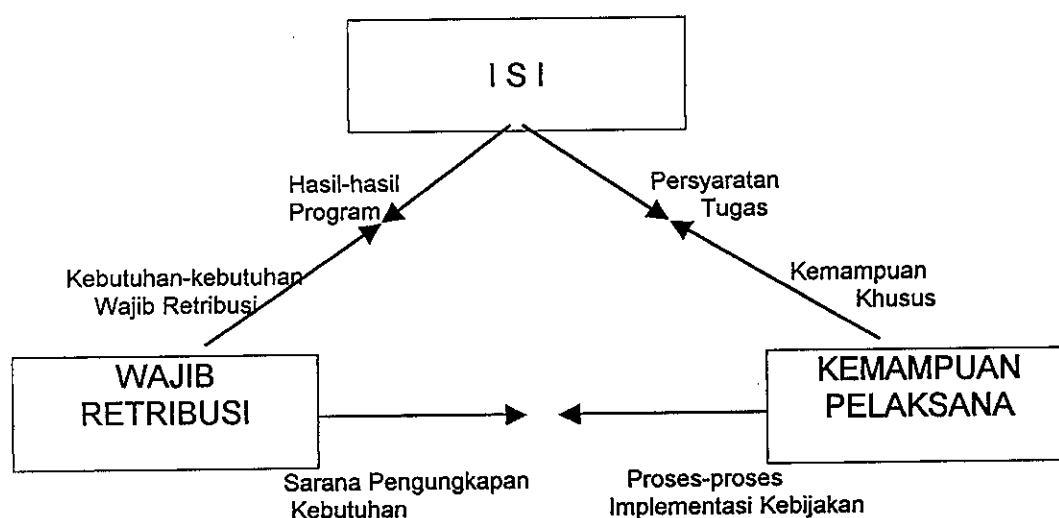
**SUSUNAN KERANGKA PIKIR IMPLEMENTASI
RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN
DI KABUPATEN KENDAL**



Mengadopsi Teori Korten dikaitkan dengan variabel-variabel yang digunakan, maka dalam penelitian ini yang dimaksud dengan Program adalah Isi, Organisasi dimaksudkan adalah Kemampuan dari pelaksananya, sedangkan Kelompok Sasaran yang dimaksudkan adalah Wajib Retribusi.

Gambar II – 6

GAMBARAN SKEMATIS MENGENAI PERSYARATAN KELAYAKAN IMPLEMENTASI RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN DI KABUPATEN KENDAL



Dari pendapat para pakar tersebut diatas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pada intinya keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh 3 variabel, yaitu :

- a. Isi
- b. Kemampuan pelaksana; dan
- c. Komunikasi.

3. Isi

Isi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah inti atau bagian yang pokok yang tertulis di dalamnya, dapat pula dikatakan bahwa isi merupakan inti/bagian pokok yang mengandung rencana yang akan dijalankan. Menurut Niti Sastro dalam Amidjojo (1989 : 14) dikatakan bahwa perencanaan pada dasarnya berkisar kepada dua hal : *Pertama* : ialah penentuan secara sadar mengenai tujuan-tujuan kongkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan, dan *Kedua* : ialah pilihan diantara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut. Baik untuk penentuan tujuan yang meliputi jangka waktu tertentu maupun bagi pemilihan cara-cara tersebut diperlukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria tertentu yang terlebih dahulu harus dipilih pula. Perencanaan dilakukan agar pelaksanaan kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan dapat lebih teratur, lebih efisien dan efektif.

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 22 tahun 2001 tentang Retribusi Jasa Usaha di Bidang Peternakan pada diktum "menimbang" huruf b terkandung tujuan diterbitkannya Peraturan Daerah nomor 22 ini yang berbunyi :

... b. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta dalam rangka *meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan Pendapatan Asli*

Daerah Kabupaten, guna mendukung keberhasilan Otonomi Daerah di Kabupaten Kendal,...

Hal ini sesuai dengan pendapat Grindle (1980) dalam Wibawa (1997 : 22) bahwa :

Isi kebijakan mencakup :

- (1) kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan,
- (2) jenis manfaat yang dihasilkan,
- (3) derajat perubahan yang diinginkan,
- (4) kedudukan pembuat kebijakan,
- (5) siapa pelaksana program,
- (6) sumber daya yang dikerahkan.

Van Meter dan Van Horn dalam Wibawa (1994: 19) menyebutkan bahwa di dalam suatu kebijakan tentulah menegaskan adanya standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan

Isi dari kebijakan retribusi pemeriksaan kesehatan hewan di pasar hewan di Kabupaten Kendal adalah sebagaimana tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Kendal nomor 22 tahun 2001, yang pada pasal 3 disebutkan bahwa objek retribusi adalah :

Pelayanan Jasa di bidang peternakan meliputi :

- a. Pemeriksaan daging/hewan yang dipotong di RPH/RPU, TPH/TPU;
- b. Pemeriksaan kulit;
- c. Pemeriksaan kebuntingan dan kemajiran;
- d. Penggunaan fasilitas RPH/RPU, TPH/TPU, Mobil Unit klinik Kesehatan Hewan Keliling/Pos Kesehatan Hewan;
- e. Penggunaan timbangan ternak;
- f. Penggunaan laboratorium kesehatan hewan;
- g. Penggunaan peralatan inseminasi buatan.

Kemudian di dalam pasal 8 tercantum sebagai berikut :

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

...d.2. Mobil Unit Klinik Kesehatan Hewan Keliling/Pos Kesehatan Hewan

- a. Pemeriksaan kesehatan hewan terhadap ternak di Pasar Hewan dan masyarakat :
 - 1. Sapi, Kerbau, Kuda per ekor sebesar Rp 1.500,00
 - 2. Kambing, Domba per ekor sebesar Rp 500,00
 - 3. Ayam, Itik dan sejenisnya per ekor sebesar Rp 100,00
- b. ...

Putra (2001 : 50) di dalam bukunya mengatakan bahwa :
 “Formulasi kebijakan publik yang baik itu adalah sebuah uraian atas kematangan pembacaan realitas sekaligus alternatif solusi yang fisible terhadap realitas tersebut”.

Dan oleh Islamy (1997:106) dikatakan bahwa :

“sifat kebijakan itu kompleks dan saling tergantung, sehingga hanya sedikit kebijakan negara yang bersifat *self-executing*, maksudnya dengan dirumuskannya kebijakan tersebut sekaligus atau dengan sendirinya kebijakan itu terimplementasikan. Yang paling banyak adalah yang bersifat *non self-executing*, artinya kebijakan negara perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak sehingga mempunyai dampak yang diharapkan”.

Memperhatikan isi Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 22 tahun 2001 khususnya mengenai Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan di Pasar Hewan nampak bahwa isi nya masih banyak yang kurang, misalnya :

- 1. Rumusan tujuan yang tercantum pada diktum “menimbang :

” meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan Pendapatan Asli daerah Kabupaten, guna mendukung keberhasilan Otonomi Daerah di Kabupaten Kendal, ...

Rumusan ini bersifat sangat umum, belum menyangkut hubungannya dengan kesehatan hewan itu sendiri.

2. Belum disebutkan dengan jelas tentang kompensasi pelayanan yang seharusnya diterima oleh wajib retribusi.
3. Belum disebutkan tentang standar pemeriksaan kesehatan hewan yang akan dilaksanakan.
4. Belum disebutkan tentang cara dan prosedur penarikan retribusi pemeriksaan kesehatan hewan.
5. Target pendapatan yang ditetapkan tidak sesuai dengan potensi yang ada.
6. Kurang adanya ketegasan tentang penetapan sasaran.

Fenomena yang diamati dalam penelitian ini meliputi : 1) tipe manfaat; 2) derajat perubahan yang diharapkan.

4. Kemampuan Pelaksana

Di dalam suatu organisasi , manusia memegang peranan penting, oleh Siagian (1995 : 150) disebutkan bahwa :

... manusia itu merupakan unsur terpenting, karena unsur-unsur lainnya yang dimiliki organisasi seperti uang, materi, mesin-mesin, metode kerja, waktu dan kekayaan lainnya hanya dapat bermanfaat bagi organisasi, jika manusia yang ada dalam organisasi itu merupakan daya pembangunan.

Di dalam implementasi kebijakan, dibutuhkan manusia-manusia yang berkualitas dan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Sedangkan oleh Wibawa (1994 : 17) dikatakan bahwa

efektifitas implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh perilaku birokrasi pelaksananya.

Menurut Van Meter dan Van Horn, organisasi pelaksana memiliki enam variabel, yang semuanya harus dicermati oleh seorang evaluator, yaitu :

- (1) kompetensi dan jumlah staf,
- (2) rentang dan derajat pengendalian,
- (3) dukungan politik yang dimiliki,
- (4) kekuatan organisasi,
- (5) derajat keterbukaan dan kebebasan komunikasi dan
- (6) keterkaitan dengan pembuat kebijakan

Kesemua variabel tersebut membentuk sikap pelaksana terhadap kebijakan yang mereka implementasikan, untuk pada akhirnya menentukan seberapa tinggi kinerja kebijakannya.

Intensitas keterlibatan para perencana, politisi, pengusaha, kelompok sasaran dan para pelaksana program akan bercampur baur mempengaruhi efektivitas implementasi.

Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi yang berhasil juga merupakan fungsi dari kemampuan organisasi pelaksana untuk melakukan apa yang diharapkan untuk dikerjakan. Kemampuan untuk melakukan kebijakan-kebijakan mungkin dihambat oleh faktor-faktor seperti staf yang kurang terlatih dan terlalu banyak pekerjaan, informasi yang tidak memadai dan sumber-sumber keuangan atau hambatan-hambatan waktu yang tidak memungkinkan.

Terkait dengan kemampuan pelaksanaan tugas implementasi kebijakan, oleh Miftah Thoha (1993 : 154) disebutkan bahwa :
 “Kemampuan adalah suatu kondisi yang menunjukkan unsur kematangan

yang berkaitan pula dengan pengetahuan dan ketrampilan yang dapat diperoleh dari pendidikan, latihan dan pengetahuan". Sedangkan menurut Robbins (2001 : 46) kemampuan (ability) merujuk ke suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Seluruh kemampuan seorang individu pada hakekatnya tersusun dari dua perangkat faktor, yaitu :

1). Kemampuan intelektual,

Adalah kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan mental yang meliputi : kemahiran berhitung, pemahaman verbal, kecepatan perseptual, penalaran induktif, penalaran deduktif, visualisasi ruang, ingatan.

2). Kemampuan fisik,

Adalah kemampuan yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas yang menuntut manusia stamina, kecekatan, kekuatan dan ketrampilan serupa.

Robbins (1996 : 128) juga menyebutkan bahwa tingkat kinerja pegawai akan sangat tergantung pada faktor kemampuan pegawai itu sendiri, seperti tingkat pendidikan, pengetahuan, pengalaman dimana dengan tingkat kemampuan yang semakin tinggi akan mempunyai kinerja yang makin tinggi pula.

Sedangkan Gibson (1990 : 21) mengemukakan bahwa kemampuan unsur pelaksana agar dapat dicapai kinerja yang efisien dan efektif adalah :

1. Kemampuan interaksi
2. Kemampuan konseptual

3. Kemampuan administrasi

Disamping hal-hal tersebut di atas, implementasi kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran terhadap kebijakan tersebut secara menyeluruh. Hal ini berarti bahwa kegagalan suatu implementasi kebijakan sering diakibatkan oleh ketidak-taatan para pelaksana terhadap kebijakan (Winarno, 2002 : 118). Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Thomas Dye dalam Islamy (2000 : 65) bahwa : "Manusia jarang sekali berbuat sesuatu untuk memaksimalkan semua nilai-nilainya; lebih sering mereka berbuat untuk memuaskan tuntutan-tuntutan tertentu saja. Manusia adalah pragmatis : yaitu mereka jarang mencari "satu cara yang terbaik", tetapi mereka akan berhenti mencari setelah menemukan "suatu cara yang dapat berjalan dengan baik". Sebagaimana dikatakan oleh David Easton dalam Islamy (2000 : 98) dikatakan bahwa " suatu kebijaksanaan negara itu bersifat otoritatif yaitu berisi nilai-nilai yang dialokasikan dan dipaksakan pelaksanaannya bagi seluruh anggota masyarakat. Untuk itu tentu saja pemerintah diberi kewenangan penuh sehingga benar-benar kebijaksanaan itu dilaksanakan oleh masyarakat".

Memperhatikan pendapat beberapa ahli tersebut diatas tentang kemampuan pelaksana yang terkait langsung dengan Implementasi Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan di Kabupaten Kendal, maka variabel yang relevan digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Kemampuan intelektual.
- b. Kemampuan interaksi.
- c. Kemampuan administrasi.

Dengan bekal kemampuan intelektual, kemampuan interaksi dan kemampuan administrasi yang dimiliki, Dinas Peternakan sebagai pengelola dan pelaksana kebijakan merupakan unsur yang menentukan sukses dan tidaknya Implementasi Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan di Kabupaten Kendal.

Fenomena yang diamati dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Kemampuan intelektual :
- 2) Kemampuan interaksi :
- 3) Kemampuan administrasi :

5. Komunikasi

Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995).

Komunikasi mempunyai peranan dan pengaruh yang besar di dalam setiap organisasi. Tanpa adanya komunikasi yang efektif, baik di dalam maupun di luar organisasi, maka efektivitas pencapaian tujuan atau kinerja organisasi akan rendah, hal ini sejalan dengan pendapat Siagian (1995 : 9) yang mengatakan bahwa :” di dalam kehidupan organisasional

pencapaian tujuan dengan segala proses remifikasinya membutuhkan komunikasi yang efektif". Dengan demikian komunikasi menduduki posisi sentral atau utama di dalam pencapaian kinerja yang maksimal.

Komunikasi merupakan aktifitas dasar manusia, karena dengan berkomunikasi manusia dapat saling berhubungan satu sama lain dalam kehidupan sehari – hari di dalam masyarakat.

Istilah komunikasi berasal dari perkataan latin "*Communicatio*" yang berarti pemberian atau pertukaran pikiran. Istilah *communicatio* tersebut bersumber dari kata *communis* yang berarti sama. Yang dimaksud dengan sama disini adalah kesamaan makna. Jadi antara orang – orang yang terlibat dalam komunikasi harus terdapat kesamaan makna, jika tidak terdapat kesamaan makna, maka komunikasi tidak berlangsung (Uchjana Effendy, 1986 : 11). Oleh sebab itu, komunikasi diartikan sebagai suatu proses penyampaian pikiran dan perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua belah pihak.

Forsdale (1981) juga mengemukakan bahwa "Komunikasi adalah suatu proses memberikan signal menurut aturan tertentu, sehingga dengan cara ini suatu sistem dapat didirikan, dipelihara, dan diubah. Pada definisi ini komunikasi juga dipandang sebagai suatu proses".

Sedangkan Ruben (1988) memberikan definisi mengenai komunikasi manusia yang lebih komprehensif sebagai berikut :
 “komunikasi manusia adalah suatu proses melalui mana individu dalam hubungannya dalam kelompok, dalam organisasi dan dalam masyarakat menciptakan, mengirim, dan menggunakan informasi untuk mengkoordinasi lingkungannya dan orang lain”.

Hal senada dikatakan oleh Widjaja (2000 : 88) sebagai berikut :

Proses penyampaian gagasan, harapan dan pesan yang disampaikan melalui lambang tertentu yang mengandung arti dilakukan oleh penyampai pesan ditujukan kepada penerima pesan. Dalam proses komunikasi, kebersamaan tersebut diusahakan melalui tukar menukar pendapat, penyampaian informasi, serta perubahan sikap dan perilaku

Pada hakikatnya setiap proses komunikasi terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1). Sumber pesan,

Adalah dasar yang digunakan dalam penyampaian pesan dan digunakan dalam rangka memperkuat pesan itu sendiri.

2). Komunikator,

Adalah orang atau kelompok yang menyampaikan pesan kepada orang lain, yang meliputi penampilan, penguasaan masalah, penguasaan bahasa.

3). Komunikan,

Adalah orang yang menerima pesan.

4). Pesan,

Adalah keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh komunikator, dimana pesan ini mempunyai pesan yang sebenarnya menjadi pengarah di dalam usaha mencoba mengubah sikap dan tingkah laku komunikan. Adapun unsur-unsur yang terdapat pada pesan meliputi :

cara penyampaian pesan, bentuk pesan (informatif, persuasif, koersif), merumuskan pesan yang mengena (umum, jelas dan gamblang, bahasa yang jelas, positif, seimbang, sesuai dengan keinginan komunikan).

5). Media,

Adalah sarana yang digunakan komunikator dalam penyampaian pesan agar dapat sampai pada komunikan, meliputi media umum, media massa.

6). Efek,

Adalah hasil akhir dari suatu komunikasi, yakni sikap dan tingkah laku orang, sesuai atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan, apabila sikap dan tingkah laku orang lain itu sesuai maka komunikasi berhasil, demikian sebaliknya.

Menurut Moekijat (1990:80) faktor – faktor yang mempengaruhi komunikasi agar dapat efektif adalah :

- a. kemampuan orang untuk menyampaikan informasi;
- b. pemilihan dengan seksama apa yang akan disampaikan oleh komunikator;
- c. saluran komunikasi yang jelas dan langsung;
- d. media yang memadai untuk menyampaikan pesan;
- e. penentuan waktu dan penggunaan media yang tepat;
- f. tempat – tempat penyebaran yang memadai apabila diperlukan untuk memudahkan penyampaian pesan yang asli, tidak dikurangi, tidak diubah, dan dalam arah yang tepat.

Adapun menurut Riyanto (1987 : 27) syarat untuk berkomunikasi secara efektif adalah antara lain :

- 1). Menciptakan situasi komunikasi yang menguntungkan.
- 2). Menggunakan bahasa yang mudah ditangkap dan dimengerti.
- 3). Pesan yang disampaikan dapat menggugah perhatian atau minat di pihak komunikan.
- 4). Pesan dapat menggugah kepentingan di pihak komunikan yang dapat menguntungkan.
- 5). Pesan dapat menumbuhkan suatu penghargaan di pihak komunikan.

Hasil akhir atau efek dari komunikasi dapat berupa :

1. Penambahan pengetahuan.
2. Peningkatan pengetahuan.
3. Perubahan sikap.
4. Perubahan tingkah laku.
5. Timbulnya kekacauan, prestise dan sebagainya

Menurut George Edwards III dalam Winarno (2002 : 126) persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan atau perintah-perintah itu dapat diikuti. Tentu saja komunikasi-komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Jika kebijakan-kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami, melainkan juga petunjuk-petunjuk itu harus jelas. Oleh George Edwards III dibahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan , yaitu :

- 1) Transmisi
- 2) Konsistensi

3) Kejelasan

Dikaitkan dengan Implementasi Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan di Kabupaten Kendal, proses komunikasi dalam penyampaian tujuan, fungsi dan sasaran retribusi antara pembuat keputusan, pejabat pelaksana serta wajib retribusi merupakan faktor yang sangat penting didalam pencapaian tujuan tersebut.

Fenomena yang diamati dalam penelitian ini meliputi : 1). Transmisi, 2). Konsistensi dan 3). Kejelasan

B. Penelitian Yang Relevan

Upaya penggalan potensi Daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) agar dapat menyelenggarakan otonomi daerah semakin kuat dengan diterbitkannya Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Di Kota Semarang upaya tersebut dilakukan antara lain melalui kebijakan retribusi parkir.

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Surami (2002) tentang Implementasi Kebijakan Parkir di Kota Semarang tahun 2002 menggunakan 3 (tiga) variabel independen, yaitu : 1). Kemampuan Pelaksana; 2). Dukungan Publik; dan 3) Komunikasi, sedangkan variabel dependennya adalah keberhasilan Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir.

Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa realisasi retribusi parkir yang hanya mencapai 60 % - 80 % (tahun 1995/1996 – 2000/2001) dari target disebabkan karena rendahnya kemampuan pelaksana dalam mengelola perparkiran dan kurangnya dukungan publik dalam memberikan informasi yang berkenaan dengan masalah perparkiran. Sehingga antara aparat pelaksana dan pengguna parkir dapat dikatakan komunikasinya rendah dan belum menunjukkan kemanfaatan yang maksimal.

Kesimpulan tersebut berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian, data tersebut kemudian diolah dengan menggunakan uji statistik SPSS (Statistical Product and Service Solutions) dengan hasil khususnya yang berkaitan dengan variabel kemampuan pelaksana dan komunikasi adalah sebagai berikut :

1. Hubungan variabel kemampuan pelaksana dengan variabel Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir , menunjukkan hubungan yang signifikan karena $z \text{ hitung} = 3,27 \geq z \text{ tabel} = 1,96$ atau H_a diterima dan H_o ditolak.
2. Hubungan variabel komunikasi dengan variabel Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir menunjukkan hubungan yang signifikan karena nilai $z \text{ hitung} = 2,66 \geq z \text{ tabel} = 1,96$ atau H_a diterima dan H_o ditolak.

Dari penelitian tersebut, telah terbukti bahwa di dalam Implementasi Kebijakan Retribusi di Kota Semarang pada tahun 2002,

variabel kemampuan pelaksana dan komunikasi mempunyai pengaruh yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut.

C. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian (Sugiyato, 2001 : 5).

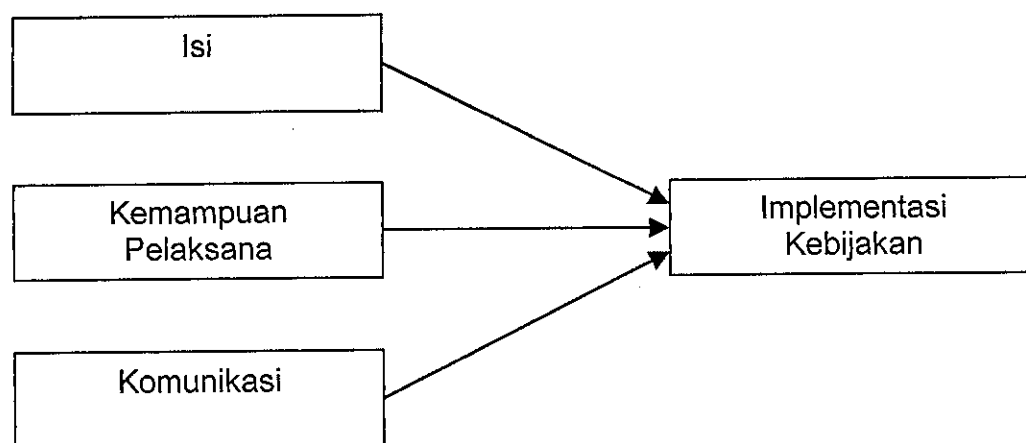
Hipotesis dalam penelitian ini disusun sebagai berikut :

1. Ada hubungan antara Isi dengan Implementasi.
2. Ada hubungan antara Kemampuan Pelaksana dengan Implementasi .
3. Ada hubungan antara Komunikasi dengan Implementasi.
4. Ada hubungan antara Isi, Kemampuan Pelaksana dan Komunikasi secara bersama-sama dengan Implementasi.

Hubungan antar variabel dapat digambarkan sebagaimana pada Gambar II-7

Gambar : II – 7

HUBUNGAN ANTAR VARIABEL



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Metode penelitian menurut Suriasumantri dalam Sugiyono, (1998 : 1) merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan yang dilandasi oleh metode keilmuan. Metode keilmuan merupakan gabungan antara pendekatan rasional dan empiris. Pendekatan rasional memberikan kerangka berpikir yang koheren dan logis. Sedangkan pendekatan empiris memberikan kerangka pengujian dalam memastikan suatu kebenaran.

Menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi (1991 : 44)

Penelitian dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) tipe, yaitu penelitian penjajakan (*eksploratif*), penelitian penjelasan (*eksplanatori*) dan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data dan bertujuan untuk memecahkan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta dan sifat populasi yang diselidiki.

Rancangan penelitian merupakan pedoman dan langkah-langkah yang akan di ikuti oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Disamping sebagai pedoman juga merupakan langkah untuk mengantisipasi berbagai hambatan terlaksananya penelitian. Suatu penelitian berangkat dari adanya permasalahan yaitu merupakan penyimpangan atau deviasi sesuatu yang

standart, atau kesenjangan antara yang sebenarnya dan kenyataan (Sugiyono, 1998 : 197)

Dalam penelitian Implementasi Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan di Kabupaten Kendal ini, penulis akan menggunakan rancangan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Data-data yang diperoleh akan didiskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat sesuai dengan fakta-fakta, sifat-sifat serta akan diteliti hubungan antar variabel.

B. Ruang Lingkup

Kebijakan Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan di Kabupaten Kendal dikelompokkan ke dalam lokasi-lokasi penarikan, yaitu :

1. Pasar Hewan
2. Rumah Potong Hewan
3. Perusahaan Peternakan
4. Peternakan Rakyat

Di dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian dibatasi pada Implementasi Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan yang pemungutannya di Pasar Hewan .

Keberhasilan Implementasi ini dipengaruhi oleh banyak faktor, namun karena keterbatasan waktu, dana, tenaga dan teori agar penelitian ini dapat dilakukan secara lebih mendalam, maka akan dibatasi pada variabel-variabel

dominan yang berpengaruh terhadap kinerja implementasi kebijakan tersebut, yaitu :

1. Isi.
2. Kemampuan Pelaksana.
3. Komunikasi

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian Implementasi Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan di Kabupaten Kendal ini adalah di seluruh pasar hewan yang ada di Kabupaten Kendal yaitu pasar-pasar hewan : Cepiring, Sukorejo, Boja dan Weleri serta Dinas Peternakan Kabupaten Kendal.

D. Variabel Penelitian

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama (Singarimbun, 1978 : 34). Berdasarkan pada pendapat diatas, maka yang dimaksud definisi konseptual dalam penelitian ini adalah :

- a) Implementasi Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan adalah suatu tindakan nyata yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Kendal dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan asli daerah dengan cara memungut retribusi dari

pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan yang dilakukan di Pasar Hewan.

b) Isi.

Isi adalah inti atau bagian yang pokok yang tertulis di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 22 tahun 2001 yang di dalamnya antara lain memuat tentang retribusi pemeriksaan kesehatan hewan di Pasar hewan.

c) Kemampuan Pelaksana adalah seluruh potensi yang dimiliki oleh pelaksana berupa pengetahuan dan ketrampilan untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang dimiliki.

d) Komunikasi adalah hubungan dua orang atau lebih yang dilakukan oleh organisasi pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Peternakan, baik hubungan intern petugas pelaksana maupun antar petugas pelaksana dengan wajib retribusi.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan atau memberikan operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk (Moh Nasir, 1999 : 152). Sedangkan menurut Suryasubrata (1985 : 83) definisi operasional adalah definisi

yang di dasarkan atas sifat-sifat yang didefinisikan yang dapat diamati/observasi.

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a). **Implementasi retribusi pemeriksaan kesehatan hewan** akan diukur

dengan indikator-indikator sebagai berikut :

- Tingkat pemahaman masyarakat/wajib retribusi atas informasi kebijakan yang disampaikan
- Tingkat umpan balik yang disampaikan masyarakat terhadap lembaga pelaksana
- Tingkat pembayaran retribusi

b) **Isi** akan diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut :

1) Tipe manfaat :

- Tingkat manfaat secara finansial
- Tingkat manfaat secara sosial

2) Derajat perubahan yang diharapkan :

- Tingkat pemahaman wajib retribusi terhadap isi kebijakan
- Tingkat pemahaman wajib retribusi tentang pentingnya kebijakan
- Sikap wajib retribusi terhadap kebijakan

c) **Kemampuan Pelaksana** akan diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut :

1)Kemampuan Intelektual :

- Tingkat pengetahuan pelaksana terhadap pemeriksaan kesehatan hewan
- Tingkat kemampuan pelaksana dalam penanganan permasalahan

2) Kemampuan Interaksi :

- Tingkat pemahaman tugas dan tanggung jawab pelaksanaan kebijakan
- Tingkat kemampuan kerjasama antara pelaksana dengan wajib retribusi
- Tingkat pelayanan pemungutan kepada wajib retribusi

3) Kemampuan Administrasi :

- Tingkat ketertiban pelaksanaan prosedur pemungutan
- Tingkat ketertiban pemungutan retribusi

d). **Komunikasi** akan diukur dari indikator-indikator sebagai berikut :

1) Transmisi

- Intensitas penyampaian informasi pelaksana kepada masyarakat/wajib retribusi
- Tingkat penyebaran informasi yang dilakukan pelaksana kepada masyarakat/wajib retribusi

2) Konsistensi

- Tingkat konsistensi informasi yang disampaikan
- Tingkat konsistensi informasi antar pejabat pelaksana

3) Kejelasan

- Tingkat kejelasan pesan/informasi yang disampaikan
- Tingkat kelengkapan pesan/ informasi yang disampaikan

E. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data-data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini pada dasarnya digolongkan menjadi dua jenis data, yaitu :

- a) Data Kuantitatif, yaitu data-data yang berupa angka-angka, skala-skala, tabel, formula dan sebagainya yang sedikit banyak menggunakan perhitungan matematika antara lain tentang jumlah ternak yang diperdagangkan, jumlah sampel, target dan realisasi pendapatan dan sebagainya.
- b) Data Kualitatif, yaitu data-data yang sulit diukur dengan angka atau ukuran-ukuran lain yang eksak, antara lain manfaat secara finansial, manfaat secara sosial, tingkat pemahaman wajib retribusi dan sebagainya.

2. Sumber Data

Sumber data diperoleh dengan cara sebagai berikut :

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama, dalam hal ini seluruh pelaksana dan wajib retribusi tentang tingkat pemahaman terhadap isi dan tujuan kebijakan, pemahaman tugas dan tanggung jawab pelaksanaan kebijakan, tingkat kerjasama antara pelaksana dengan wajib retribusi dan sebagainya

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari catatan-catatan, buku-buku, makalah, laporan, arsip, monografi yang dibutuhkan dalam penelitian antara lain tentang jumlah ternak yang diperdagangkan, jumlah sampel, target dan realisasi pendapatan dan sebagainya.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah merupakan pengukuran terhadap fenomena sosial, oleh karena itu untuk mengukur fenomena tersebut peneliti pada prinsipnya akan menggunakan alat ukur atau instrumen penelitian secara spesifik terhadap variabel yang akan diteliti.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah dengan menyusun daftar pertanyaan/kuesioner yang mengacu pada variabel independen dan variabel dependen yang telah dijabarkan dalam definisi operasional.

Dalam penelitian ini akan digunakan instrumen berupa daftar pertanyaan/kuesioner dengan skala pengukuran data ordinal yaitu

memberikan nilai atau skor untuk jawaban yang diperoleh dari daftar pertanyaan paling rendah sampai pertanyaan paling tinggi. Setiap item pertanyaan pada setiap variabel menggunakan skala pengukuran antara rentang skor 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Skor ini bersifat membedakan dan mengurutkan tetapi tidak memberikan jarak yang bobotnya ditentukan berdasarkan bobot jawaban pertanyaan.

Pedoman untuk pengukuran adalah jika terdapat jawaban dengan bobot rendah, maka diberikan skor 1 dan seterusnya sehingga jawaban yang berbobot tinggi diberi skor 4 (empat).

Di dalam jawaban pertanyaan akan berlaku aturan dimana bobot skor yaitu:

A = 4 (empat)

B = 3 (tiga)

C = 2 (dua)

D = 1 (satu)

Dari masing-masing jawaban akan digunakan kriteria sebagai berikut :

1. Kategori jawaban yang sangat mendukung diberi skor 4 (empat)
2. Kategori jawaban yang mendukung diberi skor 3 (tiga)
3. Kategori jawaban yang kurang mendukung diberi skor 2 (dua)
4. Kategori jawaban yang tidak mendukung diberi skor 1 (satu)

Agar diperoleh hasil penelitian yang obyektif dan akurat, akan dilakukan pengujian validitas instrumen penelitian dengan statistik .

Sedangkan untuk pengambilan data kualitatif akan digunakan Interview Guide, agar di dapatkan analisa yang lebih mendalam.

G. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah keseluruhan unsur-unsur yang memiliki satu atau beberapa ciri atau karakteristik yang sama (Dayan, 1996 : 110)

Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh wajib retribusi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan, sedangkan untuk mendapatkan hasil analisa kualitatif digunakan informan Pegawai Dinas Peternakan Kabupaten Kendal.

Sampel adalah merupakan bagian dari populasi yang digunakan sebagai obyek penelitian (Anto Dayan, 1996 : 65). Dalam penelitian ini untuk pengambilan sampel dari wajib retribusi akan digunakan cara *incidental random sampling* dimana seluruh elemen penelitian mempunyai peluang yang sama untuk menjadi responden. Sedangkan untuk memperoleh data dari informan Pegawai Dinas Peternakan sebagai pelaksana kebijakan akan digunakan *purposive sampling* (Moleong, 2002 : 165) yang dikombinasikan dengan sampel bola salju .

Roscoe dalam Sugiyono (2001 : 12) menyebutkan bahwa : " Ukuran sampel yang layak digunakan dalam penelitian adalah antara 30 s/d 500. Juga disebutkan oleh Roscoe bila dalam penelitian akan dilakukan analisis

dengan multivariat (korelasi atau regresi ganda misalnya), maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti.

Disamping itu berdasarkan pengamatan penulis, populasi (wajib retribusi) nya cukup homogen.

Adapun sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel : III - 7

PERKIRAAN JUMLAH POPULASI DAN SAMPEL

No	Lokasi Pasar Hewan	Perkiraan Populasi (Orang)	Sampel (Orang)
1.	Cepiring	80	27
2.	Sukorejo	100	33
3.	Boja	70	23
4.	Weleri	50	17
	Jumlah	300	100

Untuk memperoleh data kualitatif, akan digunakan informan sebagaimana pada Tabel : III – 8

Tabel : III – 8

DAFTAR INFORMAN

NO	Informan	Jumlah (Orang)
1.	Kepala Dinas	1
2.	Kasubdin Kesehatan Hewan	1
3.	Kasubbag Perencanaan	1
4.	Bendaharawan Khusus Penerima	1
5.	Petugas Pasar	4
	Jumlah	8

H. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik sebagai berikut :

1. Kuesioner/Daftar Pertanyaan

Yaitu teknik pengumpulan data dari responden/sumber data primer dengan cara mengajukan daftar pertanyaan secara tertulis kepada sampel dari wajib retribusi.

2. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dari responden/sumber data primer dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada informan dan sampel.

3. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung dengan pencatatan sistematis terhadap fenomena yang diteliti.

4. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis (dokumen-dokumen) yang langsung berhubungan dengan obyek penelitian (data skunder)

I. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini digunakan analisa kuantitatif dan analisa kualitatif.

1. Analisa Kuantitatif.

Analisa kuantitatif digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh secara langsung dari sampel (wajib retribusi) dan untuk itu akan digunakan alat bantu komputer dengan program SPSS (*Statistical Package for Social Science*). Pengujian dilakukan setelah mendapatkan data primer tentang variabel dependen (Y) implementasi kebijakan dan data primer tentang variabel independen (X) : Isi, kemampuan pelaksana dan komunikasi jawaban responden. Hasil jawaban responden tersebut kemudian ditabulasikan. Tabulasi data tersebut dilakukan dengan merubah jawaban responden menjadi kuantitatif melalui penggunaan skala ordinal. Selanjutnya untuk analisa digunakan teknik statistik non parametrik. Karena skala ordinal dengan korelasi tunggal, maka untuk pengukurannya akan digunakan sebagai berikut :

a. Koefisien Korelasi Rank Kendall Tau :

Koefisien korelasi Rank Kendall Tau digunakan untuk mengukur hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

b. Koefisien Konkordansi Kendall

Perhitungan Koefisien Konkordansi Kendall digunakan untuk mengukur hubungan antara variabel independen secara bersama-sama dengan variabel dependen.

c. Koefisien Determinasi

Untuk melihat kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variabel tergantung dapat diketahui dari besarnya koefisien determinasi berganda (R^2). Jika R^2 yang diperoleh dari perhitungan menunjukkan semakin besar (mendekati satu) maka dapat dikatakan bahwa sumbangan dari variabel bebas terhadap variasi variabel tergantung semakin besar. Hal ini berarti model yang digunakan semakin besar untuk menerangkan variabel tergantungnya. Sebaliknya jika R^2 menunjukkan semakin kecil (mendekati nol), maka dapat dikatakan bahwa sumbangan dari variabel bebas terhadap variasi nilai variabel tergantung semakin kecil. Hal ini berarti model yang digunakan semakin lemah untuk menerangkan variasi variabel tergantung. Secara umum dikatakan bahwa besarnya koefisien determinasi berganda (R^2) berada antara 0 dan 1 atau $0 \leq R^2 \leq 1$.

2. Analisa Kualitatif

Analisa kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari wawancara dengan informan.

Analisis data kualitatif ini juga untuk mempertegas dan menjelaskan secara lebih mendalam tentang hasil yang diperoleh secara kuantitatif hasil pengisian kuesioner daftar pertanyaan oleh wajib retribusi yang akan dituangkan dalam bentuk Tabel Tunggal dan Tabel Silang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN HASIL

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

Penelitian tentang Implementasi Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan di Kabupaten Kendal ini dilaksanakan di beberapa lokasi, yaitu

1. Dinas Peternakan Kabupaten Kendal;
2. Pasar Hewan di Kabupaten Kendal,

Kondisi masing-masing lokasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dinas Peternakan Kabupaten Kendal.

Untuk mengetahui organisasi pelaksana dalam Implementasi Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan di Kabupaten Kendal akan diuraikan lebih dahulu mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Peternakan Kabupaten selaku pelaksana kebijakan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di Kabupaten Kendal, disebutkan sebagai berikut :

Susunan Organisasi Dinas Peternakan Kabupaten Kendal terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Dinas;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Bagian Tata Usaha yang terdiri dari :
 - 1). Sub bagian Perencanaan;

2). Sub Bagian Keuangan;

3). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Unsur Pelaksana yaitu Sub Dinas-Sub Dinas, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang terdiri dari :

1). Sub Dinas Produksi terdiri dari ;

a). Seksi Teknik Produksi;

b). Seksi Pembibitan;

c). Seksi Pakan ;

2). Sub Dinas Usaha yang terdiri dari :

a). Seksi Pelayanan Usaha dan Sumber Daya;

b). Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran;

3). Sub Dinas Kesehatan Hewan yang terdiri dari :

a). Seksi Pengamatan dan Penyelidikan Penyakit ;

b). Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan

c). Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veterinair.

4). Sub Dinas Penyebaran Peternakan yang terdiri dari :

a). Seksi Identifikasi dan Penyiapan;

b). Seksi Penyebaran;

c). Seksi Penataan.

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Tugas Pokok Dinas Peternakan Kabupaten Kendal yaitu menyelenggarakan urusan Rumah Tangga di Bidang Peternakan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, fungsi Dinas Peternakan meliputi :

- a. Bimbingan teknis di bidang peternakan;
- b. Pelaksanaan pengkajian penerapan Teknologi Anjuran di tingkat usaha tani;
- c. Pelaksanaan usaha peternakan;
- d. Pengaturan pemberian dan pelayanan perijinan usaha peternakan;
- e. Pencegahan dan pemberantasan penyakit;
- f. Penataan dan pengaturan penyebaran ternak;
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha Dinas Peternakan;
- h. Pengelolaan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, berdasarkan Keputusan Bupati Kendal Nomor 70 tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Peternakan Kabupaten Kendal, Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut :

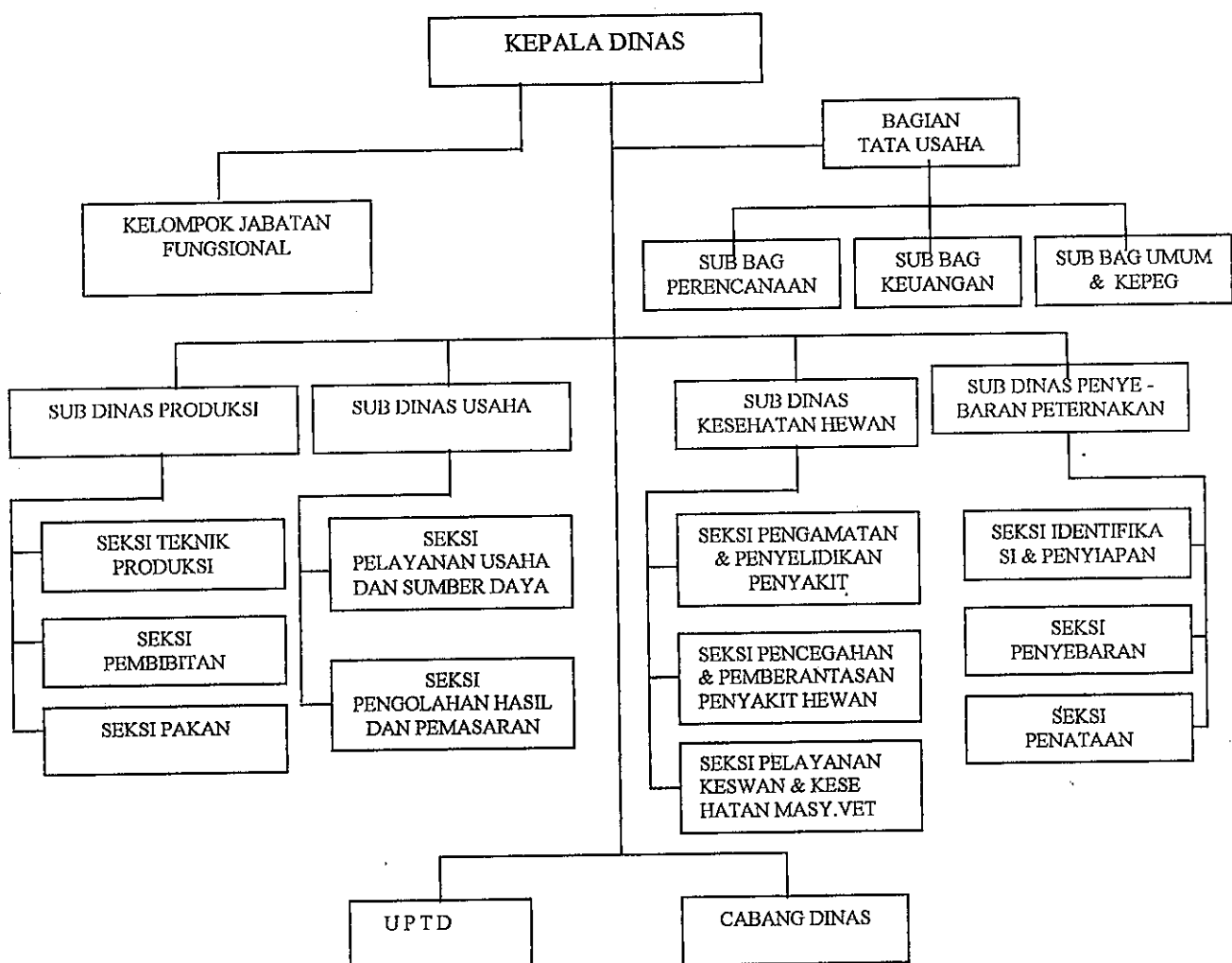
- a. Menyusun program kerja di bidang peternakan dengan cara mempelajari data yang ada, masukan dan peraturan yang ada sebagai pedoman kerja;

- b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan atasan;
- c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dengan memberikan disposisi sesuai bidang masing-masing agar pekerjaan di Dinas Peternakan berjalan lancar;
- d. Memberikan petunjuk dan arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan baik dengan lisan maupun tertulis agar pelaksanaan tugas-tugas tidak keliru;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Menyusun konsep Raperda bidang Peternakan yang diajukan ke Bupati dengan mempelajari kebutuhan peraturan agar pelaksanaan pekerjaan berjalan lancar;
- g. Merencanakan anggaran rutin dan pembangunan dengan mengusulkan kepada Pemerintah sesuai data agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- h. Memimpin rapat staf di lingkungan Dinas Peternakan berdasar data dan atau permasalahan yang ada untuk dibahas jalan keluarnya guna kelancaran pelaksanaan tugas;

- i. Menyusun Naskah Dinas di bidang peternakan sesuai peraturan yang berlaku;
- j. Menandatangani naskah dan atau konsep Naskah Dinas untuk diajukan kepada atasan;
- k. Memproses permohonan perijinan di bidang peternakan sesuai peraturan yang berlaku;
- l. Memeriksa dan menandatangani konsep laporan berkala Dinas berdasarkan data hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- m. Merumuskan kebijakan teknis bimbingan dan pembinaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun petunjuk dari Bupati agar mampu mencapai PAD;
- n. Menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Peternakan;
- o. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dengan mengadakan pengawasan melekat (waskat) agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- p. Membina bawahan dengan memberikan petunjuk lisan maupun tertulis agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- q. Mengevaluasi permasalahan di bidang peternakan berdasarkan data yang masuk untuk dipecahkan permasalahannya;

- r. Menilai prestasi kerja bawahan langsung secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Gambar IV - 1
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PETERNAK KABUPATEN KENDAL



Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di Kabupaten Kendal.

Memperhatikan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Peternakan Kabupaten Kendal tersebut diatas, maka tugas dan fungsi Dinas Peternakan yang berkaitan langsung dengan Implementasi Kebijakan Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan di Pasar Hewan di Kabupaten Kendal adalah :

- a.. Fungsi Dinas Peternakan huruf e, yaitu pencegahan dan pemberantasan penyakit;
- b. Tugas Kepala Dinas Peternakan pada
 - huruf f, yaitu menyusun konsep Raperda bidang peternakan;
 - huruf m, yaitu merumuskan kebijakan teknis bimbingan dan pembinaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - huruf o, yaitu mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dengan mengadakan pengawasan melekat (waskat).

Dari uraian tersebut di atas, maka jabatan yang terkait langsung dengan implementasi retribusi pemeriksaan kesehatan hewan di pasar hewan adalah :

- a. Kepala Dinas Peternakan
- b. Kepala Sub Dinas Kesehatan Hewan
- c. Kepala Seksi Perencanaan
- d. Bendaharawan Khusus Penerima
- e. Petugas Pasar Hewan

2. Pasar Hewan

Di Kabupaten Kendal terdapat 4 (empat) buah pasar hewan yang lokasinya terletak sebagai berikut :

- a) di desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo,
- b) di desa Gondang Kecamatan Cepiring,
- c) di desa Boja Kecamatan Boja ,
- d) di desa Weleri Kecamatan Weleri.

Masing-masing lokasi tersebut dipimpin oleh seorang Petugas Pasar dan dibantu oleh petugas lain, sesuai dengan kapasitas daya tampung pasarnya, sebagaimana tercantum dalam Tabel IV – 1.

Tabel : IV - 1
KAPASITAS TAMPUNG DAN JUMLAH PETUGAS PASAR HEWAN

No	Lokasi Pasar Hewan	Kapasitas Tampung Ternak (ekor)	Jumlah Petugas (orang)
1.	Cepiring	200	2
2.	Sukorejo	300	3
3.	Boja	225	2
4.	Weleri	100	1
	Jumlah	825	8

Ke empat pasar hewan ini berbeda-beda kondisi fisiknya. Kondisi terbaik adalah pasar hewan Sukorejo, karena pasar ini merupakan bangunan baru dan diresmikan pada bulan Mei 2003. Dengan daya tampung yang cukup memadai, tempat parkir yang luas dan tersedia kantor yang cukup representatif. Hanya saja karena letak kantornya yang tidak strategis mempersulit petugas di dalam pengawasan dan penarikan retribusi. Sehingga petugas akhirnya membuat kantor darurat dari papan yang sangat sederhana berukuran kira-kira 1,5 X 2 meter².

Untuk pasar hewan Cepiring yang pada musim penghujan sering banjir, kondisi fisiknya kurang memadai, disamping tempat parkir tidak tersedia, pancangan ternaknya kurang, kantornya juga tidak ada, sehingga petugas pasar hewan memberikan pelayanan sambil berdiri.

Pasar hewan Boja kondisinya paling parah, karena masih menempati lokasi sementara, saat ini bangunan lama sudah dibongkar untuk pasar umum dan bangunan baru belum dibangun sama sekali karena belum ada kecocokan lokasi antara pedagang ternak dengan pemerintah. Dengan lokasi yang sempit dan tidak representatif, kantor darurat ukuran 1 X 1,5 meter², pancangan ternak tidak ada serta jalan keluar masuknya ternak tidak satu pintu, sehingga menyulitkan pengawasan dan penarikan retribusi.

Pasar hewan Weleri yang masih menempati bekas pasar umum juga masih kurang representatif, karena tidak memiliki kantor dan jalan

keluar masuknya ternak sangat terbuka sehingga mempersulit petugas yang hanya satu orang untuk dapat memonitor ternak dan menarik retribusi.

B. Hasil Penelitian

Hasil penelitian penulis peroleh dari jawaban atas pertanyaan yang disampaikan baik kepada responden (wajib retribusi) maupun informan.

Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 100 (seratus) orang terdiri dari pedagang ternak dan petani ternak sebagai wajib retribusi, sedangkan jumlah informan 8 orang yaitu pejabat yang terkait langsung dengan implementasi retribusi pemeriksaan kesehatan hewan di pasar hewan adalah : Kepala Dinas Peternakan ; Kepala Sub Dinas Kesehatan Hewan; Kepala Seksi Perencanaan; Bendaharawan Khusus Penerima; dan 4 orang Petugas Pasar Hewan.

Pertama-tama hasil penelitian akan ditampilkan dalam bentuk deskripsi terhadap tabel tunggal yang meliputi data variabel : Isi, Kemampuan Pelaksana, Komunikasi serta Implementasi.

Kemudian juga akan ditampilkan tabel silang antara variabel independen dan variabel dependen. Penggunaan tabel tunggal dan tabel silang ini diharapkan dapat memberikan gambaran awal secara menyeluruh tentang hubungan antar variabel penelitian.

Implementasi retribusi pemeriksaan kesehatan hewan di pasar hewan di Kabupaten Kendal sangat dipengaruhi oleh banyak variabel, antara lain Isi, Kemampuan Pelaksana dan Komunikasi.

1. Isi

Manfaat retribusi secara finansial bagi Pemerintah oleh responden dinilai sangat bermanfaat 11 %, bermanfaat 73%, kurang bermanfaat 15% dan 1 % menjawab tidak bermanfaat, sebagaimana tercantum pada Tabel IV – 2 dibawah ini.

Tabel : IV - 2
MANFAAT RETRIBUSI SECARA FINANSIAL
BAGI PEMERINTAH DAERAH

NO	Manfaat Retribusi Secara Finansial	f	%
1	Tidak bermanfaat	1	1.0
2	Kurang bermanfaat	15	15.0
3	Bermanfaat	73	73.0
4	Sangat bermanfaat	11	11.0
	Total	100	100.0

Sumber : *Diolah dari jawaban pertanyaan no.1*

Dari responden yang memberikan jawaban sangat bermanfaat dan bermanfaat, ternyata sebagian besar mengatakan tidak tahu persis penggunaan dana retribusi , sedangkan yang mengetahui ternyata yang pernah mengikuti sosialisasi.

Sedangkan manfaat retribusi secara sosial , hanya 2 % responden yang menjawab sangat bermanfaat, 68 % menjawab bermanfaat, 24 % kurang bermanfaat dan 6 % menganggap tidak bermanfaat yang secara rinci tercantum pada Tabel IV - 3

Tabel : IV - 3
MANFAAT RETRIBUSI SECARA SOSIAL
BAGI PEMERINTAH DAERAH

NO	Manfaat Retribusi Secara Sosial	f	%
1	Tidak bermanfaat	6	6.0
2	Kurang bermanfaat	24	24.0
3	Bermanfaat	68	68.0
4	Sangat bermanfaat	2	2.0
	Total	100	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban pertanyaan no.2

Sebagian besar responden menganggap bahwa aspek sosial tersebut meskipun bermanfaat, ternyata belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat, khususnya para petani ternak dan pedagang ternak.

Tingkat pemahaman responden terhadap tujuan kebijakan ternyata tidak ada seorangpun yang merasa sangat paham, 34 % paham, 60 % kurang paham sedangkan responden yang tidak paham sebanyak 6%. Dari jawaban tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian besar responden (66 %) tidak paham terhadap tujuan kebijakan retribusi

pemeriksaan kesehatan hewan. Hal ini secara jelas tercantum pada Tabel IV – 4 di bawah ini.

Tabel : IV - 4
TINGKAT PEMAHAMAN TUJUAN RETRIBUSI

NO	Tingkat Pemahaman Tujuan Retribusi	f	%
1	Tidak memahami	6	6.0
2	Kurang memahami	60	60.0
3	Memahami	34	34.0
4	Sangat memahami	0	0.0
	Total	100	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban pertanyaan no.3

Menurut responden tingkat pentingnya penarikan retribusi disebutkan sangat penting 7 %, penting 70 %, kurang penting 22 % dan 1 % menjawab tidak penting, yang secara detail tersaji pada Tabel IV – 5.

Tabel : IV - 5
PENTINGNYA PENARIKAN RETRIBUSI

NO	Pentingnya Penarikan Retribusi	f	%
1	Tidak penting	1	1.0
2	Kurang penting	22	22.0
3	Penting	70	70.0
4	Sangat penting	7	7.0
	Total	100	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban pertanyaan no.4

Jawaban ini senada dengan jawaban responden terhadap manfaat retribusi secara finansial maupun secara sosial dimana sebagian besar

menjawab bermanfaat. Dari pernyataan responden dapat disimpulkan bahwa sebenarnya retribusi pemeriksaan kesehatan hewan ini bermanfaat dan penting, hanya saja mereka banyak yang tidak paham terhadap tujuan serta belum merasakan secara langsung manfaat tersebut.

Adapun tingkat dukungan responden terhadap kebijakan adalah 3 % sangat mendukung, 82 % mendukung, 15 % kurang mendukung, dan tidak ada seorangpun yang tidak mendukung kebijakan tersebut, sebagaimana terinci pada Tabel IV – 6 berikut ini.

Tabel : IV - 6
TINGKAT DUKUNGAN TERHADAP RETRIBUSI

NO	Tingkat Dukungan Terhadap Retribusi	f	%
1	Tidak mendukung	0	0.0
2	Kurang mendukung	15	15.0
3	Mendukung	82	82.0
4	Sangat mendukung	3	3.0
	Total	100	100.0

Sumber : *Diolah dari jawaban pertanyaan no.5*

Tingkat dukungan yang baik ini merupakan penopang utama implementasi kebijakan retribusi pemeriksaan kesehatan hewan di pasar hewan apabila dikelola secara optimal.

2. Kemampuan Pelaksana :

Kemampuan petugas pelaksana di pasar hewan dapat dilihat dari tingkat pemeriksaan kesehatan hewan yang dilakukan. Tingkat pemeriksaan kesehatan hewan yang dilakukan di pasar hewan ternyata baru dilaksanakan kurang dari 50 % dari ternak yang masuk pasar hewan (Tabel IV – 7), hal ini berdasarkan pada jawaban responden yang 100 % menjawab demikian dan jawaban ini diperkuat dengan keterangan dari petugas pasar.

Tabel : IV - 7
PERSENTASE TERNAK YANG DIPERIKSA KESEHATANNYA

NO	Persentase Ternak Yang Diperiksa Kesehatannya	f	%
1	< 50 %	100	100.0
2	50 – 74%	0	0.0
3	75 – 99%	0	0.0
4	100%	0	0.0
Total		100	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban pertanyaan no.6

Dari kenyataan tersebut menunjukkan bahwa tujuan penarikan retribusi pemeriksaan kesehatan hewan di pasar hewan agar dapat menyediakan ternak yang sehat untuk diperdagangkan tidak dapat sepenuhnya tercapai, karena tidak semua ternak diperiksa kesehatannya. Hal ini disebabkan karena jumlah petugas yang kurang memadai dibandingkan dengan jumlah ternak yang harus diawasi dan

diperiksa kesehatannya, disamping kondisi pasar hewan yang belum dapat memberlakukan satu pintu untuk keluar masuknya ternak.

Kemampuan petugas dalam pemeriksaan kesehatan hewan oleh responden dipandang cukup bervariasi, secara rinci tercantum pada Tabel IV – 8.

Tabel : IV -8
KEMAMPUAN PETUGAS DALAM PEMERIKSAAN HEWAN

NO	Kemampuan Pemeriksaan Kesehatan Hewan	f	%
1	Tidak memadai	1	1.0
2	Kurang memadai	14	14.0
3	Memadai	81	81.0
4	Sangat memadai	4	4.0
	Total	100	100.0

Sumber : *Diolah dari jawaban pertanyaan no.7*

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kemampuan petugas dalam pemeriksaan kesehatan hewan sudah memadai (81%), hal ini diperkuat oleh keterangan petugas pasar sebagai informan yang menyatakan bahwa petugas pasar hewan 3 orang berpendidikan setingkat SLTA, seorang berpendidikan Sarjana Peternakan dan seluruhnya sudah pernah mengikuti kursus maupun diklat Kursus Juru Peternakan, Diklat Kesehatan Hewan bahkan Inseminasi Buatan dan latihan-latihan lain.

OPT-POSTAK-UNDIP

Untuk tingkat kemampuan petugas dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan penarikan retribusi, oleh 74 % responden dinilai memadai, 23 % menilai kurang memadai dan 3 % menilai tidak memadai, sebagaimana tertulis pada Tabel IV – 9 dibawah ini. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya kemampuan petugas sudah memadai dalam mengatasi permasalahan yang timbul.

Tabel : IV - 9
PENGETAHUAN PETUGAS
DALAM MENANGANI PERMASALAHAN KEBIJAKAN

NO	Pengetahuan Menangani Permasalahan	f	%
1	Tidak memadai	3	3.0
2	Kurang memadai	23	23.0
3	Memadai	74	74.0
4	Sangat memadai	0	0.0
	Total	100	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban pertanyaan no.8

Sedangkan untuk pemeriksaan kesehatan hewan yang dilakukan petugas, tidak ada responden yang menilai bahwa pemeriksaan itu sangat memadai, 12 % menilai memadai, 35 % responden menilai kurang memadai, sedangkan 53% menilai tidak memadai, sebagaimana tertuang pada Tabel IV – 10.

Tabel : IV - 10
KUALITAS PEMERIKSAAN

NO	Kualitas Pemeriksaan	f	%
1	Tidak memadai	53	53.0
2	Kurang memadai	35	35.0
3	Memadai	12	12.0
4	Sangat memadai	0	0.0
	Total	100	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban pertanyaan no.9

Kenyataan ini menunjukkan bahwa sebenarnya kemampuan petugas baik, namun karena jumlah personilnya yang kurang maka pemeriksaan kesehatan hewan hanya dilakukan terhadap kurang dari separoh hewan yang diperdagangkan sehingga pemeriksaan yang dilakukan dinilai kurang memadai, karena hanya berupa pengamatan. Dalam Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2001 disebutkan bahwa untuk pemeriksaan kesehatan hewan di pasar hewan digunakan Mobil Unit Klinik Kesehatan Hewan Keliling/Pos Kesehatan Hewan, tetapi realisasi pemanfaatan fasilitas Mobil Unit Klinik Kesehatan Hewan Keliling/Pos Kesehatan Hewan untuk pemeriksaan kesehatan hewan di pasar hewan baru dapat dilaksanakan setiap 3 bulan sekali.

Untuk tingkat kerja sama petugas dengan responden, 8 % mengatakan sangat baik, 81 % mengatakan baik, 8 % mengatakan kurang baik dan 3 % mengatakan tidak baik. Untuk mengetahui secara detail dapat dilihat pada Tabel IV –11 berikut ini.

Tabel : IV - 11

TINGKAT HUBUNGAN KERJASAMA DENGAN PETUGAS

NO	Hubungan Kerjasama Petugas	f	%
1	Tidak baik	3	3.0
2	Kurang baik	8	8.0
3	Baik	81	81.0
4	Sangat baik	8	8.0
	Total	100	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban pertanyaan no.10

Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa kerja sama antara petugas dengan wajib retribusi terjalin dengan baik. Responden yang mengatakan kurang baik 8 % dan tidak baik 3 % adalah wajib retribusi yang selama ini sulit ditarik retribusi.

Tingkat pelayanan petugas kepada wajib retribusi dinilai 4 % sangat baik, 90 % baik, 5 % menilai kurang baik dan 1 % tidak baik. Secara lebih rinci tercantum pada Tabel IV – 12.

Tabel : IV - 12

KUALITAS PELAYANAN PETUGAS

NO	Kualitas Pelayanan Petugas	f	%
1	Tidak baik	1	1.0
2	Kurang baik	5	5.0
3	Baik	90	90.0
4	Sangat baik	4	4.0
	Total	100	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban pertanyaan no.11

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pelayanan petugas sudah baik, dari responden yang menjawab kurang dan tidak baik adalah mereka yang merasa dikejar-kejar untuk membayar retribusi.

Pelaksanaan prosedur penarikan retribusi pemeriksaan kesehatan hewan oleh petugas pasar hewan dinilai oleh 7 % responden baik, 93 % menilai kurang baik, sedangkan yang menilai sangat baik dan tidak baik tidak ada, sebagaimana tertuang pada Tabel IV – 13 dibawah ini.

Tabel : IV -13
PELAKSANAAN PROSEDUR PENARIKAN RETRIBUSI

NO	Pelaksanaan Prosedur Penarikan Retribusi	f	%
1	Tidak baik	0	0.0
2	Kurang baik	93	93.0
3	Baik	7	7.0
4	Sangat baik	0	0.0
	Total	100	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban pertanyaan no.12

Penarikan retribusi kesehatan hewan yang dilaksanakan dipasar hewan adalah ternak datang dicatat jumlahnya oleh petugas, setelah laku baru retribusinya dibayar oleh wajib retribusi atau petugas yang harus menarik. Namun karena keluar masuknya ternak tidak hanya melalui satu pintu, seringkali pedagang yang ternaknya sudah laku berusaha tidak membayar retribusi dengan melalui pintu lain.

Semua ternak yang akan diperdagangkan seharusnya diperiksa kesehatannya, ini berarti sebelum masuk pasar hewan, ternaknya harus diperiksa dulu sekaligus ditarik retribusinya.

Tingkat ketertiban penarikan retribusi kepada wajib retribusi oleh 4 % responden dinilai sangat baik, hal ini berarti semua pedagang/petani ternak membayar retribusi, tidak ada yang lolos, 65 % menilai baik yang berarti hanya ada satu dua orang yang mangkir tidak membayar retribusi, 31 % menilai kurang baik yang diartikan bahwa pedagang/petani ternak yang mangkir tidak membayar retribusi mencapai ± 10 %. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel IV – 14 berikut ini.

Tabel : IV -14
TINGKAT KETERTIBAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

NO	Ketertiban Pemungutan Retribusi	f	%
1	Tidak baik	0	0.0
2	Kurang baik	31	31.0
3	Baik	65	65.0
4	Sangat baik	4	4.0
	Total	100	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban pertanyaan no.13

Menurut responden mangkirnya beberapa wajib retribusi ini disebabkan oleh beberapa hal, *pertama* karena moral, *kedua* karena ada kesempatan beberapa pintu yang memungkinkan lolosnya mereka dan

ketiga karena tidak adanya tindakan atau sanksi kepada wajib retribusi yang mangkir tersebut.

3. Komunikasi :

Tingkat komunikasi antara petugas dengan wajib retribusi antara lain dilihat dari tingkat sosialisasi yang pernah diikuti wajib retribusi, tingkat penyampaian informasi, jumlah wajib retribusi yang mengikuti sosialisasi, tingkat konsistensi informasi yang disampaikan, tingkat konsistensi informasi antar petugas, tingkat kejelasan informasi dan tingkat kelengkapan informasi.

Frekuensi sosialisasi yang pernah diikuti oleh wajib retribusi dapat dijelaskan bahwa tidak ada wajib retribusi yang pernah mengikuti sosialisasi lebih dari 2 (dua) kali, 1 % pernah mengikuti sosialisasi 2 (dua) kali, 12 % pernah mengikuti satu kali dan 87 % tidak pernah mengikuti sosialisasi. Secara rinci tercantum pada Tabel IV – 15 dibawah ini,

Tabel : IV - 15
FREKUENSI MENGIKUTI SOSIALISASI KEBIJAKAN

NO	Frekuensi Mengikuti Sosialisasi	f	%
1	Tidak pernah	87	87.0
2	1 (satu) kali	12	12.0
3	2 (dua) kali	1	1.0
4	> 2 (dua) kali	0	0.0
	Total	100	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban pertanyaan no.14

Dari keterangan yang diperoleh tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan melalui petugasnya masih sangat kurang

Sedangkan tingkat penyampaian informasi yang dilakukan oleh petugas pasar hewan kepada wajib retribusi adalah sangat baik 1 %, baik 38 %, kurang baik 43 % dan tidak baik 12 %, sebagaimana terinci pada Tabel IV – 16.

Tabel : IV - 16
TINGKAT PENYAMPAIAN INFORMASI

NO	Tingkat Penyampaian Informasi	F	%
1	Tidak baik	18	18.0
2	Kurang baik	43	43.0
3	Baik	38	38.0
4	Sangat baik	1	1.0
	Total	100	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban pertanyaan no.15

Dari data tersebut nampak bahwa tingkat penyampaian informasi dari petugas pasar kepada wajib retribusi masih kurang baik. Hal ini antara lain disebabkan karena kurangnya sarana, baik ruang pertemuan maupun sarana berupa pengeras suara yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana penyampai informasi. Informasi biasanya tertulis yang ditempelkan pada kantor pasar (bagi yang memiliki kantor) dan pemberitahuan secara lisan langsung kepada wajib retribusi, sehingga

memang dimungkinkan banyak wajib retribusi yang tidak tahu karena tidak (bisa) membaca atau tidak mendengar informasi yang disampaikan.

Jumlah wajib retribusi yang pernah mengikuti sosialisasi menurut seluruh responden kurang dari 50 % (Tabel IV – 17). Bahkan secara lisan ditambahkan keterangan bahwa wajib retribusi yang pernah mengikuti sosialisasi kurang lebih baru 10 %.

Tabel : IV - 17
PERSENTASE WAJIB RETRIBUSI YANG MENERIMA SOSIALISASI

NO	Persentase yang Menerima Sosialisasi	f	%
1	< 50%	100	100.0
2	50 – 74 %	0	0.0
3	75 – 74 %	0	0.0
4	100 %	0	0.0
	Total	100	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban pertanyaan no.16

Dengan jumlah yang sangat minim dari wajib retribusi yang pernah mengikuti sosialisasi, maka pemahaman wajib retribusi terhadap kebijakan tentu saja akan minim pula.

Untuk tingkat konsistensi informasi yang disampaikan, oleh 3 % responden disebutkan sangat konsisten, 84 % menyebutkan konsisten, 11 % kurang konsisten dan 2 % menyebutkan tidak konsisten. Secara rinci tercantum pada Tabel IV – 18 dibawah ini. Informasi yang

dimaksudkan disini adalah informasi yang sangat sederhana, misalnya mengenai tarif retribusi ternak.

Tabel : IV - 18

KONSISTENSI INFORMASI YANG DISAMPAIKAN

NO	Konsistensi Informasi yang Disampaikan	f	%
1	Tidak konsisten	2	2.0
2	Kurang konsisten	11	11.0
3	Konsisten	84	84.0
4	Sangat konsisten	3	3.0
	Total	100	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban pertanyaan no.17

Sedangkan untuk konsistensi informasi yang disampaikan antar petugas pelaksana 1 % responden menyatakan sangat konsisten, 81 % konsisten, 17 % kurang konsisten dan 1 % menyatakan tidak konsisten, sebagaimana tercantum pada Tabel IV –19.

Dengan tingkat konsistensi informasi yang baik (81 %) antar petugas, maka wajib retribusi akan yakin dan tidak ragu-ragu terhadap informasi yang disampaikan

Tabel : IV - 19

KONSISTENSI INFORMASI ANTAR PETUGAS PELAKSANA

NO	Konsistensi Informasi Antar Petugas	f	%
1	Tidak konsisten	1	1.0
2	Kurang konsisten	17	17.0
3	Konsisten	81	81.0
4	Sangat konsisten	1	1.0
	Total	100	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban pertanyaan no.18

Kejelasan informasi yang disampaikan oleh petugas, responden yang menyatakan sangat jelas tidak ada, 65 % menyatakan jelas, 33 % kurang jelas dan 2 % menyatakan tidak jelas . Secara rinci tercantum pada Tabel IV – 20 berikut ini.

Tabel : IV - 20
KEJELASAN INFORMASI YANG DISAMPAIKAN

NO	Kejelasan Informasi	f	%
1	Tidak jelas	2	2.0
2	Kurang jelas	33	33.0
3	Jelas	65	65.0
4	Sangat jelas	0	0.0
	Total	100	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban pertanyaan no.19

Kelengkapan informasi yang disampaikan, tidak ada responden yang menyatakan sangat lengkap, 6 % responden menyatakan lengkap, 65 % responden menyatakan kurang lengkap sedangkan 29 % menyatakan tidak lengkap, sebagaimana tertulis pada Tabel IV – 21 berikut ini.

Tabel : IV - 21
KELENGKAPAN INFORMASI YANG DISAMPAIKAN

NO	Kelengkapan Informasi	f	%
1	Tidak lengkap	29	29.0
2	Kurang lengkap	65	65.0
3	Lengkap	6	6.0
4	Sangat lengkap	0	0.0
	Total	100	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban pertanyaan no.20

Kurang lengkapnya informasi yang disampaikan petugas kepada responden (65 %) disebabkan kurang lengkapnya isi kebijakan, kurangnya sarana penyampaian informasi serta kurangnya petugas pelaksana.

Hasil yang diperoleh dari penelitian didapatkan bahwa tingkat pemahaman wajib retribusi terhadap isi kebijakan adalah masih ada wajib retribusi yang tidak memahami isi kebijakan sebanyak 32 %, kurang memahami 62 % dan yang memahami 6 %, sedangkan yang sangat memahami kebijakan tidak ada. Secara rinci hal ini terdapat pada Tabel IV – 22 berikut ini.

Tabel : IV - 22
TINGKAT PEMAHAMAN ISI KEBIJAKAN

NO	Pemahaman Isi Kebijakan	f	%
1	Tidak memahami	32	32.0
2	Kurang memahami	62	62.0
3	Memahami	6	6.0
4	Sangat memahami	0	0.0
	Total	100	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban pertanyaan no.21

Responden yang menyatakan memahami isi kebijakan adalah responden yang memang sudah lama masa kerjanya sebagai pedagang ternak dan pernah mengikuti sosialisasi yang di selenggarakan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Kendal.

Tingkat kepedulian responden terhadap kebijakan dilihat dari tingkat penyampaian usul /saran yang disampaikan ternyata didapatkan hanya ada 1 % yang sering menyampaikan usul/saran, 1 % kadang-kadang, 39 % pernah menyampaikan usul/saran dan yang tidak pernah menyampaikan usul/saran 59 % (Tabel IV – 23). Ini menunjukkan bahwa tingkat kepedulian responden terhadap kebijakan retribusi pemeriksaan kesehatan hewan masih sangat kurang.

Tabel : IV - 23
FREKUENSI PENYAMPAIAN USUL, SARAN DAN MASUKAN

NO	Frekuensi Penyampaian Usul, Saran dan Masukan	f	%
1	Tidak pernah	59	59.0
2	Pernah	39	39.0
3	Kadang-kadang	1	1.0
4	Sering	1	1.0
	Total	100	100.0

Sumber : *Diolah dari jawaban pertanyaan no.22*

Usul, saran dan masukan yang disampaikan responden, ternyata yang selalu mendapatkan tanggapan dari petugas tidak ada, yang sering mendapatkan tanggapan 4 %, kadang-kadang mendapatkan tanggapan 44 %, sedangkan yang tidak pernah mendapatkan tanggapan sebanyak 52 %, sebagaimana tertuang pada Tabel IV – 24.

Hal ini menunjukkan tingkat kepedulian dan pelayanan petugas kepada wajib retribusi yang masih kurang.

Tabel : IV - 24
TANGGAPAN ATAS USUL, SARAN DAN MASUKAN
YANG DISAMPAIKAN

NO	Tanggapan Atas Usul, Saran dan Masukan	f	%
1	Tidak pernah	52	52.0
2	Kadang-kadang	44	44.0
3	Sering	4	4.0
4	Selalu	0	0.0
	Total	100	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban pertanyaan no.23

Dari tanggapan yang diberikan oleh petugas, maka tidak ada tanggapan sangat baik yang diterima oleh responden, 12 % responden menerima tanggapan baik, 35 % responden menerima tanggapan yang kurang baik dan 53 % responden merasa menerima tanggapan yang tidak baik, yang secara rinci tercantum pada Tabel IV – 25 berikut ini.

Hal ini juga menunjukkan bahwa petugas kurang merespon dengan baik terhadap usul/saran yang disampaikan wajib retribusi

Tabel : IV - 25
KUALITAS TANGGAPAN YANG DITERIMA

NO	Kualitas Tanggapan yang Diterima	f	%
1	Tidak baik	53	53.0
2	Kurang baik	35	35.0
3	Baik	12	12.0
4	Sangat baik	0	0.0
	Total	100	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban pertanyaan no.24

Hasil penelitian terhadap tingkat pembayaran retribusi pemeriksaan kesehatan hewan menunjukkan bahwa hanya ada 3 % wajib retribusi yang membayar 100 % kewajiban retribusinya, 52 % membayar antara 75 – 99 %, 34 % membayar antara 50 – 74 %, sedangkan 11 % wajib retribusi hanya membayar kurang dari 50 %. Secara jelas dapat dilihat pada Tabel IV – 26.

TABEL : IV - 26
PERSENTASE TERNAK YANG DIBAYAR RETRIBUSINYA

NO	Persentase Ternak yang Dibayar Retribusinya	f	%
1	< 50%	11	11.0
2	50-74%	34	34.0
3	74-99%	52	52.0
4	100%	3	3.0
	Total	100	100.0

Sumber : Diolah dari jawaban pertanyaan no.25

Dari hasil penelitian tersebut juga di dapatkan bahwa 3 % wajib retribusi yang membayar 100 % adalah petani ternak yang menjual ternaknya sendiri yang semula dipelihara. Tingkat kepatuhan petani ternak terhadap kewajiban membayar retribusi ini memang sangat baik , karena dia tidak berdagang dan menganggap ternak peliharaannya tersebut sebagai tabungan. Sedangkan para pedagang ternak membayar

retribusi maksimal hanya sejumlah ternaknya yang laku terjual, sedangkan yang tidak laku tidak dibayar retribusinya.

C. Analisis Hasil Penelitian

Analisis terhadap hasil penelitian ini dilakukan dengan melihat hubungan (Koefisien Korelasi) antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y) yang ditampilkan dalam Tabel Silang dan teknik statistik uji hipotesis dari data yang telah di score. Selanjutnya juga akan di analisis Koefisien Korelasi Berganda (Koefisien Konkordansi) dan juga Koefisien Determinasi.

1. Analisis Tabel Silang

Analisis Tabel Silang digunakan untuk mendapatkan gambaran secara deskriptif kualitatif mengenai hubungan antara setiap variabel independen dengan variabel dependen.

Analisis hubungan antar variabel dengan menggunakan Tabel Silang paling tidak mensyaratkan dua hal yang harus dilakukan, *pertama*, penerapan aturan selisih nilai persentase titik ekstrim (epsilon) terbaik bagi penyimpulan ada tidaknya hubungan, *kedua*, penggunaan nilai gamma untuk mengetahui arah dan kekuatan hubungan variabel berskala ordinal. Namun karena kondisi sebaran nilai pada Tabel 4*4 belum kuat untuk dianalisis, maka untuk menghitung epsilon dilakukan analisis melalui elaborasi Tabel 2*2.

a. Hubungan Isi dengan Implementasi

Hubungan isi dengan implementasi dilihat dari nilai persentase pada setiap sel dalam Tabel IV – 27.

TABEL : IV – 27
TABEL SILANG 4*4
HUBUNGAN ISI DENGAN IMPLEMENTASI

			KV- X1				Total
			1,00	2,00	3,00	4,00	
KV-Y	1,00	Count % within KV-X1		1 6,3%	12 16,4%		13 13,0%
	2,00	Count % within KV-X1	1 33,3%	6 37,5%	29 39,7%	1 12,5%	37 37,0%
	3,00	Count % within KV-X1		8 50,0%	20 27,4%	4 50,0%	32 32,0%
	4,00	Count % within KV-X1	2 66,7%	1 6,3%	12 16,4%	3 37,5%	18 18,0%
Total		Count % within KV-X1	3 100,0 %	16 100,0%	73 100,0%	8 100,0%	100 100,0%

Sumber : Diolah dari data primer.

Analisis hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 8 orang responden yang sangat paham terhadap isi, prosentase terbesar (50%) implementasinya baik; dari 73 responden yang paham terhadap isi, prosentase terbesar (39,7 %) implementasinya kurang baik; sedangkan dari 16 orang responden yang kurang paham terhadap isi, prosentase terbesar (50 %) implementasinya baik; serta dari 3 orang yang tidak paham terhadap isi, ternyata prosentase terbesarnya (66,6 %) implementasinya sangat baik. Kondisi ini

adanya hubungan antara isi dengan implementasi retribusi pemeriksaan kesehatan hewan .

TABEL : IV – 28
TABEL SILANG 2*2
HUBUNGAN ISI DENGAN IMPLEMENTASI

			K2V-X1		Total
			1,00	2,00	
K2V-Y	1,00	Count	8	42	50
		% within K2V-X1	42,1%	51,9%	50,0%
	2,00	Count	11	39	50
		% within K2V-X1	57,9%	48,1%	50,0%
Total		Count	19	81	100
		% within K2V-X1	100,0%	100,0%	100,0%

Sumber : *Diolah dari data primer.*

Melalui penghitungan dan pemilihan besar selisih persentase antar dua titik ekstrim yang terbaik (epsilon) pada Tabel IV-28, diketahui sebesar 9,8 %. Nilai ini diartikan bahwa dengan kehadiran variabel isi telah memberikan perubahan sebesar 9,8 % pada tingkat implementasi. Jadi hubungan antara variabel isi dengan variabel implementasi retribusi pemeriksaan kesehatan hewan di kabupaten Kendal bersifat positif namun kurang kuat.

Kemudian untuk nilai gamma sebesar 0,065 dengan signifikansi 0,679 dapat diartikan bahwa ada hubungan positif yang kurang kuat dan tidak signifikan antara variabel isi dengan variabel implementasi

retribusi pemeriksaan kesehatan hewan di kabupaten Kendal. Secara rinci tercantum pada Tabel IV-29.

TABEL : IV – 29
UJI SIGNIFIKANSI
HUBUNGAN ISI DENGAN IMPLEMENTASI

	Value	Asymp Std.Error ^a	Approx. T ^b	Approx Sig.
Ordinal by ordinal Gamma N of Valid Cases	,065 100	,157	,413	,679

Sumber : Diolah dari data primer

b. Hubungan Kemampuan Pelaksana dengan Implementasi

Hubungan kemampuan pelaksana dengan implementasi dilihat dari nilai persentase pada setiap sel dalam Tabel IV – 30.

TABEL : IV –30
TABEL SILANG 4*4
HUBUNGAN KEMAMPUAN PELAKSANA DENGAN IMPLEMENTASI

			KV- X2				Total
			1,00	2,00	3,00	4,00	
KV-Y	1,00	Count	1	4	7	1	13
		% within KV-X2	25,0%	12,1%	14,3%	7,1%	13,0%
	2,00	Count	2	13	18	4	37
		% within KV-X2	50,0%	39,4%	36,7%	28,6%	37,0%
	3,00	Count	1	10	16	5	32
		% within KV-X2	25,0%	30,3%	32,7%	35,7%	32,0%
	4,00	Count		6	8	4	18
		% within KV-X2		18,2%	16,3%	28,6%	18,0%
Total	Count		4	33	49	14	100
	% within KV-X2		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Sumber : Diolah dari data primer.

Analisis hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 14 orang yang kemampuan pelaksanaannya sangat memadai, prosentase terbesar (35,7%) implementasinya baik; dari 49 yang kemampuan pelaksanaannya memadai, prosentase terbesar (36,7 %) implementasinya kurang baik; sedangkan dari 33 orang yang kemampuan pelaksanaannya kurang memadai, prosentase terbesar (39,4 %) implementasinya kurang baik; serta dari 4 orang yang kemampuan pelaksanaannya tidak memadai, ternyata prosentase terbesar (50 %) implementasinya kurang baik. Kondisi ini menunjukkan adanya hubungan antara Kemampuan Pelaksana dengan Implementasi Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan di kabupaten Kendal.

TABEL : IV – 31

TABEL SILANG 2*2

HUBUNGAN KEMAMPUAN PELAKSANA DENGAN IMPLEMENTASI

			K2V-X2		Total
			1,00	2,00	
K2V-Y	1,00	Count	20	30	50
		% within K2V-X2	54,1%	47,6%	50,0%
	2,00	Count	17	33	50
		% within K2V-X2	45,9%	52,4%	50,0%
Total		Count	37	63	100
		% within K2V-X2	100,0%	100,0%	100,0%

Sumber : Diolah dari data primer.

sebesar 6,5 %. Nilai ini diartikan bahwa dengan kehadiran variabel kemampuan pelaksana telah memberikan perubahan sebesar 6,5 % pada tingkat implementasi. Jadi hubungan antara variabel kemampuan pelaksana dengan variabel implementasi retribusi pemeriksaan kesehatan hewan di kabupaten Kendal bersifat positif namun kurang kuat.

TABEL : IV – 32
UJI SIGNIFIKANSI
HUBUNGAN KEMAMPUAN PELAKSANA DENGAN IMPLEMENTASI

	Value	Asymp Std.Error ^a	Approx. T ^b	Approx Sig.
Ordinal by ordinal Gamma N of Valid Cases	,146 100	,128	1,127	,260

Sumber : Diolah dari data primer.

Kemudian untuk nilai gamma sebesar 0,146 dengan signifikansi 0,260 dapat diartikan bahwa ada hubungan positif yang kurang kuat dan tidak signifikan antara variabel kemampuan pelaksana dengan variabel implementasi retribusi pemeriksaan kesehatan hewan di kabupaten Kendal. Secara rinci tercantum pada Tabel IV-32.

c. Hubungan Komunikasi dengan Implementasi

Hubungan komunikasi dengan implementasi dilihat dari nilai persentase pada setiap sel dalam Tabel IV – 33.

TABEL : IV -33
TABEL SILANG 4*4
HUBUNGAN KOMUNIKASI DENGAN IMPLEMENTASI

			KV- X3				Total
			1,00	2,00	3,00	4,00	
KV-Y	1,00	Count % within KV-X3	1 33,3%	1 12,5%	5 16,1%	6 10,3%	13 13,0
	2,00	Count % within KV-X3		5 62,5%	10 32,3%	22 37,9%	37 37,0%
	3,00	Count % within KV-X3		2 25,0%	13 41,9%	17 29,3%	32 32,0%
	4,00	Count % within KV-X3	2 66,7%		3 9,7%	13 22,4%	18 18,0%
Total		Count % within KV-X3	3 100,0%	8 100,0%	31 100,0%	58 100,0%	100 100,0%

Sumber : Diolah dari data primer.

Analisis hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 58 orang yang komunikasinya sangat baik, prosentase terbesar (37,9%) implementasinya kurang baik; dari 31 yang komunikasinya baik, prosentase terbesar (41,9 %) implementasinya baik; sedangkan dari 8 orang yang komunikasinya kurang baik, prosentase terbesar (62,5 %) implementasinya kurang baik; serta dari 3 orang yang komunikasinya tidak baik, ternyata prosentase terbesarnya (66,7 %) implementasinya sangat baik. Kondisi ini menunjukkan kurang adanya hubungan antara komunikasi dengan implementasi retribusi pemeriksaan kesehatan hewan .

TABEL : IV – 34
TABEL SILANG 2*2
HUBUNGAN KOMUNIKASI DENGAN IMPLEMENTASI

			K2V-X3		Total
			1,00	2,00	
K2V-Y	1,00	Count	7	43	50
		% within K2V-X3	63,6%	48,3%	50,0%
	2,00	Count	4	46	50
		% within K2V-X3	36,4%	51,7%	50,0%
Total		Count	11	89	100
		% within K2V-X3	100,0%	100,0%	100,0%

Sumber : Diolah dari data primer

Melalui penghitungan dan pemilihan besar selisih persentase antar dua titik ekstrim yang terbaik (epsilon) pada Tabel IV-34, diketahui sebesar 15,3 %. Nilai ini diartikan bahwa dengan kehadiran variabel komunikasi telah memberikan perubahan sebesar 15,3 % pada tingkat implementasi. Jadi hubungan antara variabel komunikasi dengan variabel implementasi retribusi pemeriksaan kesehatan hewan di kabupaten Kendal bersifat positif dan kuat.

TABEL : IV – 35
UJI SIGNIFIKANSI
HUBUNGAN KOMUNIKASI DENGAN IMPLEMENTASI

		Value	Asymp Std.Error ^a	Approx. T ^b	Approx Sig.
Ordinal by ordinal	Gamma	,145	,142	1,013	,311
N of Valid Cases		100			

Sumber : Diolah dari data primer.

Kemudian untuk nilai gamma sebesar 0,145 dengan signifikansi 0,311 dapat diartikan bahwa ada hubungan positif yang kurang kuat dan tidak signifikan antara variabel komunikasi dengan variabel implementasi retribusi pemeriksaan kesehatan hewan di kabupaten Kendal. Secara rinci tercantum pada Tabel IV-35.

2. Analisis Statistik Uji Hipotesis

Analisis statistik uji hipotesis hubungan antar variabel dengan skala variabel ordinal-ordinal akan menggunakan dua perhitungan pokok, yaitu : *pertama*, korelasi setiap variabel independen dengan variabel dependen dengan menggunakan rumus Rank Kendall, *kedua*, korelasi semua variabel independen dengan variabel dependen dengan menggunakan rumus Konkordansi Kendall. Kemudian juga akan dilihat tingkat sumbangan variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan rumus Determinasi.

a. Koefisien Korelasi Kendall

Koefisien korelasi Kendall digunakan untuk mengetahui tingkat hubungan antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Tingkat korelasi masing-masing variabel isi, kemampuan pelaksana dan komunikasi dengan implementasi sebagaimana tercantum pada Tabel IV-36.

TABEL : IV – 36
KOEFISIEN KORELASI ANTARA ISI, KEMAMPUAN PELAKSANA DAN
KOMUNIKASI DENGAN IMPLEMENTASI

		V-X1	V-X2	V-X3	V-Y
Kendall's tau-b	V-X1 Correlation Coefficient	1,000	,034	,012	,056
	Sig.(2-tailed)	,	,669	,882	,476
	N	100	100	100	100
	V-X2 Correlation Coefficient	,034	1,000	,086	,053
	Sig.(2-tailed)	,669	,	,281	,498
	N	100	100	100	100
	V-X3 Correlation Coefficient	,012	-,086	1,000	,086
	Sig.(2-tailed)	,882	,281	,	,275
	N	100	100	100	100
	V-Y Correlation Coefficient	,056	,053	,086	1,000
	Sig.(2-tailed)	,476	,498	,275	,
	N	100	100	100	100

Sumber : *Diolah dari data primer.*

1) Koefisien Korelasi Isi dengan Implementasi

Dari hasil analisis statistik, diperoleh angka koefisien korelasi Kendall antara Isi dengan Implementasi sebesar 0,056 dengan signifikansi 0,679. Dapat diartikan bahwa *tidak ada hubungan antara isi dengan implementasi* , sehingga diputuskan untuk **menolak hipotesis kerja** bahwa ada hubungan antara isi dengan implementasi dan **menerima H_{null} (H_o)**.

2) Koefisien Korelasi Kemampuan Pelaksana dengan Implementasi

Dari hasil analisis statistik, diperoleh angka koefisien korelasi Kendall antara Kemampuan Pelaksana dengan Implementasi sebesar 0,053 dengan signifikansi 0,260. Dapat diartikan bahwa *tidak ada hubungan antara kemampuan pelaksana dengan implementasi* , sehingga

diputuskan untuk **menolak hipotesis kerja** bahwa ada hubungan antara kemampuan pelaksana dengan implementasi dan **menerima H_{null} (H_o)**.

3) Koefisien Korelasi Komunikasi dengan Implementasi

Dari hasil analisis statistik, diperoleh angka koefisien korelasi Kendall antara Isi dengan Implementasi sebesar 0,086 dengan signifikansi 0,311. Dapat diartikan bahwa *tidak ada hubungan antara komunikasi dengan implementasi*, sehingga diputuskan untuk **menolak hipotesis kerja** bahwa ada hubungan antara komunikasi dengan implementasi dan **menerima H_{null} (H_o)**.

b. Koefisien Konkordansi Kendall

Koefisien Konkordansi Kendall digunakan untuk melihat korelasi secara bersama-sama antara Isi, Kemampuan Pelaksana dan Komunikasi dengan Implementasi.

TABEL : IV – 37
KOEFISIEN KONKORDANSI ANTARA
ISI, KEMAMPUAN PELAKSANA DAN KOMUNIKASI
DENGAN IMPLEMENTASI

N	100
Kendall,s W ^a	,869
Chi-Square	260,721
Df	3
Asymp.Sig	,000

Sumber : *Diolah dari data primer.*

Dari analisis statistik diperoleh angka Koefisien Konkordansi Kendall sebesar 0,869 dengan tingkat signifikansi 0,00. Dapat diartikan bahwa *ada hubungan yang sangat signifikan antara variabel isi, kemampuan pelaksana dan komunikasi secara bersama-sama dengan implementasi*, sehingga diputuskan untuk **menerima hipotesis kerja** bahwa ada hubungan antara isi, kemampuan pelaksana dan komunikasi secara bersama-sama dengan implementasi dan **menolak H_{null} (H_0)**.

c. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi dihitung untuk melihat tingkat sumbangan variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin nilainya mendekati 1 berarti sumbangan variabel bebas terhadap variabel tergantung semakin besar.

Koefisien Determinasi secara bersama-sama antara Isi, Kemampuan Pelaksana dan Komunikasi terhadap Implementasi Kebijakan adalah :

$$(0,869)^2 \times 100 \% = 75,52 \%$$

D. Diskusi

Setelah dilakukan penelitian di lapangan dan analisis uji statistik didapatkan bahwa koefisien korelasi antara Isi dengan Implementasi sebesar 0,056 dengan tingkat signifikansi 0,679 sehingga dapat

diinterpretasikan bahwa tidak ada hubungan antara Isi dengan Implementasi retribusi pemeriksaan kesehatan hewan di kabupaten Kendal .

Koefisien korelasi antara Kemampuan Pelaksana dengan Implementasi Kebijakan sebesar 0.053 dengan tingkat signifikan 0,260 sehingga dapat diinterpretasikan bahwa tidak ada hubungan antara Kemampuan Pelaksana dengan Implementasi retribusi pemeriksaan kesehatan hewan di kabupaten Kendal.

Koefisien korelasi antara Komunikasi dengan Implementasi sebesar 0,086 dengan tingkat signifikansi 0,311 , sehingga dapat diinterpretasikan bahwa tidak ada hubungan antara Komunikasi dengan Implementasi retribusi pemeriksaan kesehatan hewan di kabupaten Kendal.

Dari hasil penelitian ternyata diperoleh kesimpulan bahwa variabel Isi, Kemampuan Pelaksana dan Komunikasi secara sendiri-sendiri tidak mempunyai hubungan dengan implementasi retribusi pemeriksaan kesehatan hewan di kabupaten Kendal, hasil ini tidak sesuai dengan teori dimana secara teoritis ketiga variabel yaitu Isi, Kemampuan Pelaksana dan Komunikasi merupakan variabel penentu dalam Implementasi Kebijakan. Ketidak sesuaian ini diduga disebabkan oleh beberapa hal, yaitu : 1) kurang tepatnya penyusunan instrumen pertanyaan sehingga sulit dimengerti oleh responden; 2) kurang tepatnya di dalam penentuan responden dan 3) teknik pengumpulan data melalui daftar pertanyaan secara kuantitatif saja kurang dapat memberikan gambaran sebenarnya mengenai keadaan responden.

Adapun hubungan Isi, Kemampuan Pelaksana dan Komunikasi secara bersama-sama dengan Implementasi mempunyai koefisien konkordansi 0,869 dengan tingkat signifikansi 0,00. Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa ketiga variabel tersebut mempunyai hubungan yang sangat signifikan dengan implementasi retribusi pemeriksaan kesehatan hewan di kabupaten Kendal.

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel isi, kemampuan pelaksana dan komunikasi secara sendiri-sendiri tidak mempunyai hubungan dengan implementasi, namun apabila dilakukan secara simultan, ketiga variabel tersebut mempunyai hubungan yang sangat signifikan terhadap implementasi. Hal tersebut berarti bahwa variabel isi, kemampuan pelaksana dan komunikasi sangat mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi retribusi pemeriksaan kesehatan hewan di kabupaten Kendal apabila dilakukan secara simultan, tetapi apabila masing-masing variabel berdiri sendiri, maka variabel-variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap implementasi.

Hal ini di dukung oleh pendapat beberapa pakar antara lain Van Meter dan Van Horn; Grindle, David C Korten dan George Edwards III sebagai berikut :

- Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa kebijaksanaan akan meraih prestasi bila variabel-variabel antara lain : ukuran-ukuran dan tujuan kebijaksanaan (yang merupakan komponen isi), komunikasi dan

UPT-PUSTAK-UNRIPT

sikap pelaksana dilakukan secara simultan, karena variabel-variabel tersebut memang saling terkait (Gambar II-2)

- Grindle menyebutkan bahwa implementasi kebijakan ditentukan oleh isi dan konteks (yang antara lain mencakup karakteristik lembaga dan penguasa yang dapat diinterpretasikan sebagai pelaksana) yang merupakan satu kesatuan agar diperoleh hasil kebijakan yang optimal (Gambar II-3).
- David C Korten dengan teori triangulasi menyatakan bahwa daya kerja suatu program pembangunan merupakan fungsi dari program, organisasi (pelaksana) dan kelompok sasaran, karena merupakan fungsi berarti variabel-variabel tersebut saling mendukung dan saling memperkuat bila dilaksanakan secara bersama-sama.
- George Edwards III menyebutkan ada 4 (empat) faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, yaitu : komunikasi, sumber-sumber (antara lain sumber daya manusia sebagai pelaksana), kecenderungan-kecenderungan dan struktur birokrasi.

Mengintegrasikan pendapat para pakar tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa variabel isi, kemampuan pelaksana dan komunikasi harus dilaksanakan secara simultan agar di dapatkan sinergi yang akan mempengaruhi keberhasilan implementasi retribusi pemeriksaan kesehatan hewan di kabupaten Kendal. Hal ini dapat dipahami karena meskipun isi kebijakan baik, lengkap dan jelas, tidak akan ada artinya bila tidak di dukung

dengan komunikasi yang baik dan pelaksana yang mampu mengimplementasikannya. Demikian pula sebaik apapun komunikasi yang dilakukan, bila tidak di dukung oleh isi kebijakan yang lengkap dan jelas serta pelaksana yang berkemampuan, maka tujuan implementasi juga tidak akan tercapai secara optimal dan setinggi apapun kemampuan pelaksana, bila tidak di dukung dengan isi yang lengkap dan jelas serta komunikasi yang baik maka kebijakan tersebut tidak akan dimengerti oleh wajib retribusi yang mengakibatkan tidak optimalnya implementasi.

Dari analisis yang dilakukan diperoleh Koefisien Determinasi sebesar 75,52 % yang menunjukkan tingkat sumbangan variabel isi, kemampuan pelaksana dan komunikasi terhadap Implementasi. Hal ini berarti bahwa ada faktor-faktor lain di luar ketiga variabel tersebut yang memberikan sumbangan sebesar 24,48 % terhadap Implementasi Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan di kabupaten Kendal.

Faktor-faktor lain diluar ketiga faktor tersebut diatas antara lain keragaman perilaku kelompok sasaran, dukungan dari pejabat atasan dan dukungan politik yang nyata, dukungan publik dan sumber-sumber serta kondisi sosio ekonomi dan teknologi.

Oleh sebab itu maka perlu diperhatikan pula faktor-faktor diluar isi, kemampuan pelaksana dan komunikasi tersebut, karena ternyata dari pengamatan di lapangan didapatkan bahwa dari keempat pasar hewan yang ada masing-masing memiliki kebiasaan dan tradisi yang berbeda dalam

pelaksanaan pembayaran retribusi. Ada kecenderungan bahwa tingkat kesadaran wajib retribusi dan kelancaran pembayaran retribusi di pasar hewan Sukorejo dan Weleri lebih baik bila dibandingkan pasar hewan Cepiring dan Boja. Bahkan di pasar hewan Cepiring ada biaya tambahan yang terpaksa harus dikeluarkan wajib retribusi sebesar Rp.3.000,- dari setiap ekor sapi yang laku yang dibeli oleh pedagang dari luar kota untuk "penggiring" (orang yang memelihara ternak di perjalanan, orang ini bawaannya pembeli). Kebiasaan ini menambah beban pada wajib retribusi, sehingga akhirnya retribusi pemeriksaan kesehatan hewan yang tidak dibayar atau pembayarannya sangat minim, dari pengamatan penulis setiap satu mobil truk (10 ekor sapi) yang laku hanya membayar retribusi Rp. 5.000,-.

Dari pengamatan penulis juga didapatkan adanya perbedaan persepsi tentang dukungan terhadap kebijakan antara wajib retribusi dengan Pemerintah Daerah, dimana wajib retribusi merasa mendukung kebijakan bila sudah (meskipun persentasenya kecil) membayar retribusi, padahal dukungan tersebut baru sebagian kecil dari kewajiban sebenarnya.

Demikian juga terhadap kondisi prasarana yang ada yang belum memadai sehingga menyulitkan petugas dalam pengawasan dan penarikan retribusi serta belum memadainya imbalan yang diterima oleh petugas juga mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan.

Oleh sebab itu maka agar Implementasi Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan di Kabupaten Kendal dapat optimal, maka perlu diambil langkah-langkah strategis dan terpadu dengan melibatkan seluruh stakeholders yang ada antara lain Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) selaku pengelola pendapatan daerah, Dinas Pasar selaku pengelola fisik pasar hewan, Dinas Peternakan Kabupaten Kendal, Petugas Pasar Hewan, wajib retribusi serta masyarakat luas sebagai konsumen terhadap hasil produksi ternak.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Setelah dilakukan pembahasan secara bertahap pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Koefisien korelasi antara Isi dengan Implementasi sebesar 0,056 dengan tingkat signifikansi 0,679 sehingga dapat diinterpretasikan bahwa tidak ada hubungan antara Isi dengan Implementasi Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan di kabupaten Kendal .
2. Koefisien korelasi antara Kemampuan Pelaksana dengan Implementasi sebesar 0,053 dengan tingkat signifikan 0,260 sehingga dapat diinterpretasikan bahwa tidak ada hubungan antara Kemampuan Pelaksana dengan Implementasi Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan di kabupaten Kendal.
3. Koefisien korelasi antara Komunikasi dengan Implementasi sebesar 0,086 dengan tingkat signifikansi 0,311 , sehingga dapat diinterpretasikan bahwa tidak ada hubungan antara Komunikasi dengan Implementasi Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan di kabupaten Kendal .
4. Hubungan Isi, Kemampuan Pelaksana dan Komunikasi secara bersama-sama dengan Implementasi mempunyai koefisien konkordansi

0,869 dengan tingkat signifikansi 0,00. Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa ketiga variabel tersebut secara bersama-sama mempunyai hubungan yang sangat signifikan dengan Implementasi Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan di kabupaten Kendal.

5. Variabel isi, kemampuan pelaksana dan komunikasi harus dilaksanakan secara simultan agar di dapatkan sinergi yang akan mempengaruhi keberhasilan Implementasi Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan di kabupaten Kendal.
6. Dari analisis yang telah dilakukan diperoleh Koefisien Determinasi sebesar 75,52 % yang menunjukkan tingkat sumbangan variabel Isi, Kemampuan Pelaksana dan Komunikasi terhadap Implementasi. Hal ini berarti bahwa ada faktor-faktor lain di luar ketiga variabel tersebut yang memberikan sumbangan sebesar 24,48 % terhadap Implementasi Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan di kabupaten Kendal.
7. Perlu diperhatikan pula faktor-faktor diluar isi, kemampuan pelaksana dan komunikasi tersebut. Faktor-faktor lain diluar ketiga faktor tersebut diatas antara lain keragaman perilaku kelompok sasaran, dukungan dari pejabat atasan dan dukungan politik yang nyata, dukungan publik dan sumber-sumber serta kondisi sosio ekonomi dan teknologi.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka saran yang akan disampaikan penulis diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, khususnya dalam rangka mewujudkan optimalisasi Implementasi Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan di Kabupaten Kendal.

Meskipun berdasarkan analisis tidak ada hubungan antara variabel-variabel isi, kemampuan pelaksana dan komunikasi secara sendiri-sendiri dengan implementasi, namun karena ketiga variabel tersebut secara simultan mempunyai hubungan yang sangat signifikan dengan implementasi dan tingkat sumbangannya yang cukup besar (75,52 %), maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Isi.

Agar Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 22 Tahun 2001 dapat dilaksanakan secara optimal perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknisnya secara lengkap.

2. Kemampuan Pelaksana.

Kemampuan pelaksana khususnya di dalam penanganan pemungutan retribusi pemeriksaan kesehatan hewan perlu ditingkatkan, baik melalui kursus, pendidikan dan latihan maupun dengan cara studi banding ke daerah lain yang lebih maju.

3. Komunikasi.

Agar wajib retribusi memahami tujuan kebijakan dan akhirnya memberikan dukungan yang diwujudkan dalam pembayaran retribusi sesuai dengan ketentuan, perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas komunikasi berupa sosialisasi baik berupa penyuluhan maupun secara tertulis.

4. Agar Implementasi dapat berjalan secara optimal, maka variabel-variabel isi, kemampuan pelaksana dan komunikasi harus dilakukan secara bersama-sama (simultan).
5. Selain ketiga faktor tersebut diatas perlu pula dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Penyediaan prasarana yang memadai yang akan menunjang tugas penarikan retribusi, antara lain adanya sistem satu pintu di pasar hewan, sarana komunikasi, sarana kantor serta pancangan ternak.
 - b. Perlu peningkatan koordinasi antara Petugas Dinas Pasar dan Petugas Peternakan dalam penarikan retribusi, sehingga akan di dapatkan hasil yang optimal.
 - c. Karena Peraturan Daerah merupakan suatu Kebijakan, maka mempunyai sifat "paksaan" yang secara potensial sah untuk dilakukan. Oleh sebab itu perlu dilakukan operasi yustisi penegakan Peraturan Daerah bekerja sama dengan Kantor Satpol PP Kabupaten dan Kepolisian untuk menanggulangi wajib retribusi yang tidak memenuhi ketentuan.

- d. Perlu adanya peningkatan kesejahteraan bagi petugas Dinas Peternakan di pasar hewan dengan memberikan imbalan berupa biaya operasional yang memadai.
 - e. Perlu adanya komitmen dan dukungan politik secara konkrit baik dari elit Eksekutif maupun Legislatif Pemerintah Kabupaten Kendal.
6. Untuk memperbaiki kinerja hasil penelitian ini dapat disarankan penyempurnaan dalam hal :
- a. Penyusunan instrumen pertanyaan yang lebih operasional sehingga mudah dimengerti oleh responden;
 - b. Penentuan responden dilakukan dengan cara *purposive sampling*;
 - c. Teknik pengumpulan data selain melalui daftar pertanyaan secara kuantitatif juga perlu dilengkapi dengan kualitatif sehingga akan didapatkan gambaran sebenarnya mengenai keadaan responden .

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi A Setiawan (Trans), DC Korten dan Sjahrir, 1988, *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, Edisi Pertama Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Abdul Wahab Solichin, 1997, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Edisi Kedua, Bumi Aksara, Jakarta.
- _____, 2001, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Edisi Kedua, Bumi Aksara, Jakarta.
- Gibson James L, John M.I, James H Donnely, 1996, *Organisasi, Perilaku, Struktur dan Proses*, edisi ke delapan, Inter Aksara, Jakarta.
- Hasan M Iqbal, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hardjito, Dydiet, 2001, *Teori Organisasi dan Teknik Pengorganisasian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Islamy M Irfan, 2000, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Malang.
- _____, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta.
- Koentjoroningrat, 1983. *Leadership and Development*, Terjemahan, cetakan ke dua, FISIP UNDIP, Semarang.
- Miftah Thoha, 1993, *Perilaku Organisasi Konsep dan Aplikasinya*, Penerbit Rajawali, Jakarta.
- Moleong Lexy J, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mufiz Ali dkk, 2003, *Modul Pelatihan Metodologi Penelitian Kebijakan*, Pusat Kajian Kebijakan dan Strategi Pembangunan Fisip Undip, Semarang.
- Poerwanti Endang, 2000, *Pendekatan Kuantitatif Dalam Penelitian Perilaku*, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah, Malang.

- Robbins P Stephens, 1996, *Perilaku Organisasi*, Jilid I , PT Prenhallindo, Jakarta.
- Siagian P Sondang, 1995, *Teori Motivasi dan Aplikasinya*, Bina Aksara, Jakarta.
- Siegel Sidney, 1994, *Statistik Non Parametrik Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, PT Gramedia, Jakarta.
- Singarimbun Masri, 1978, *Metode Penelitian Sosial*, Edisi Pertama, Mustika Jaya, Jakarta.
- Singarimbun Masri dan Sofyan effendi, 1991, *Metode penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.
- Subrata S Surya, 1985, *Metodologi Penelitian*, edisi pertama, CV Rajawali, Jakarta.
- Sugiyono, 2001, *Statistik Non Parametris untuk Penelitian*, Cetakan Kedua, CV Alfabeta, Bandung.
- Tjokroamidjojo Bintoro, 1989, *Perencanaan Pembangunan*, CV Haji Masagung, Jakarta.
- Wibawa Samudra, Yuyun Purbo Kusumo dan Agus Pramusinto, 1997, *Evaluasi Kebijakan Publik* , Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Widjaja, 2000, *Ilmu Komunikasi Pengantar Study*, Cetakan Kedua, Rineka Cipta, Jakarta.
- Winarno Budi, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta.
- Yuwono Teguh dkk, 2001, *Manajemen Otonomi Daerah Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru*, CL Gapps Diponegoro University, Semarang.
- Undang-undang Nomor 6 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Undang-undang Nomor 18 tahun 1987 tentang *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.
- Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1983 tentang *Kesehatan Masyarakat Veteriner*.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang *Retribusi Daerah*.

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 tahun 1998 tentang *Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah*.

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 tahun 2001 tentang *Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Di Kabupaten Kendal*.

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 22 tahun 2001 tentang *Retribusi Jasa Usaha Bidang Peternakan*.

Keputusan Bupati Kendal Nomor 50 tahun 2001 tentang *Sumbangan Pihak Ketiga dari Pengusaha Peternakan Kepada Daerah Kabupaten Kendal*.

Keputusan Bupati Kendal Nomor 70 tahun 2001 tentang *Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Peternakan Kabupaten Kendal*.